

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2023



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syarifuddin Yoes No.39, Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur 76115

email:

balikpapan.dilmil07@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diselesaikan dan disajikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya, serta sebagai Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga melaporkan pencapaian kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan sarana dan prasarana selama tahun 2023.

Dalam pencapaian sasaran dan target program kerja tahun 2023, secara umum target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kerja yang akan datang agar hasil yang dicapai dapat lebih baik lagi sesuai yang diharapkan.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



Balikpapan, 31 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penggunaan anggaran untuk menunjang kinerja pada DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI kode satker 663246 sebesar Rp. 4.407.106.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta seratus enam ribu rupiah) dan pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI kode satker 663247 sebesar Rp. 110.840.000,- (seratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 – 2024.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang secara umum diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

Pertama: Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi dan,

Kedua: Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran **Pertama** adalah Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, **Kedua** adalah Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dan **Ketiga** adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 6 (enam) indikator kinerja dan target kinerja sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan atau Perjanjian Kinerja Tahun 2023 rata-rata persentase capaian kinerja mencapai 104% (seratus empat persen).

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tahun 2020 - 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

- a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- b. Program Dukungan Manajemen.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	105,95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	111
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN: 105,65%		

Tabel 1: Tabel Pencapaian Kinerja Keseluruhan

FAKTOR PENDUKUNG:

Capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara keseluruhan pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis sebesar 105,65% (seratus lima koma enam lima persen) dari 6 (enam) sasaran tersebut terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang nilai capaiannya lebih dari 100% (seratus persen) dan 2 (dua) sasaran strategis nilai capaiannya memenuhi target yang telah ditentukan.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berlangsung dengan sangat baik. Hal tersebut berdampak pada pencapaian target kinerja tersebut yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di dukung oleh peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta kinerja aparatur non teknis pengadilan sehingga terpenuhinya target kinerja tersebut.

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2023 sebesar 105,95% (seratus lima koma sembilan lima persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis I tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS I			
	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%
2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	75%	86,11%	114,8%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi	85%	84,72%	99,7%
4.	Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	98,77%	104%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS I: 105,95 %				

Tabel 2: Tabel Sasaran Strategis I

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2023 sebesar 100% (seratus persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis II tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS II			
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS II : 100 %				

Tabel 3: Tabel Sasaran Strategis II

Pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2023 sebesar 111% (seratus sebelas persen). Rincian capaian kinerja Sasaran Strategis III tersebut tergambar pada tabel capaian kinerja berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS III			
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PADA SASARAN STRATEGIS III : 111 %				

Tabel 4: Tabel Sasaran Strategis III

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Isu Strategis (<i>Strategic Issue</i>)	8
D. Struktur Organisasi	8
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Keuangan.....	86
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Menurut Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam Pasal 3 Undang - Undang tersebut dinyatakan bahwa asas - asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan

tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mempublikasikan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (*result*) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LKjIP Tahun 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI mempunyai kedudukan yang kuat.



Foto Tampak Depan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sejak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (MABES TNI) Ke Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Peta Wilayah Hukum Dilmil I-07 Balikpapan

Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi:

- 2 (dua) Provinsi yaitu:
 - a. Provinsi Kalimantan Timur
 - b. Provinsi Kalimantan Utara
- 4 (empat) Kota yaitu:
 - a. Kota Samarinda
 - b. Kota Balikpapan
 - c. Kota Bontang
 - d. Kota Tarakan
- 5 (lima) Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kabupaten Kutai Timur
 - b. Kabupaten Berau
 - c. Kabupaten Bulungan
 - d. Kabupaten Malinau
 - e. Kabupaten Nunukan

2. Tugas Pokok

Mengenai justisiabel Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu teknis yudisial maupun non teknis yudisial Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang - undangan.

3. Fungsi

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, di bidang fungsi teknis yudisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis tersebut antara lain:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:
 - 1) Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwaanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang - undangan menjadi wewenanganya).

- 2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan tatalaksana.
 - c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.
 - d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, Administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
 - e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan, penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah - kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
- 2) Peningkatan kualitas aparaturnya pengadilan.
- 3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
- 4) Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. Isu Strategis (*Strategic Issue*)

Adapun Isu Strategis (*Strategic Issue*) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan sistem tata kerja, ruang lingkup kerja dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Penguatan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi pejabat struktural dan fungsional pada Pengadilan.
3. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sistem pengadilan dan akses publik.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada PERMA Nomor 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan dan PERMA Nomor 01 tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang perubahan atas PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan:

- a) Kepala Pengadilan Militer
- b) Wakil Kepala Pengadilan Militer

2. Unsur Kepaniteraan:

Panitera membawahi antara lain:

- a) Panitera Muda Pidana.
 - 1) Pengadministrasi Hukum
 - 2) Pengadministrasi Registrasi Perkara
 - 3) Pengelolaan Perkara

- 4) Analis Perkara Peradilan
- b) Panitera Muda Hukum.
 - 1) Pengadministrasi Hukum
 - 2) Pengadministrasi Register Perkara
 - 3) Pengolah Data Informasi dan Hukum

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan

- a) Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - 1) Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
 - 2) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Pengelola Sistem dan Jaringan
- b) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
 - 1) Penyusun Laporan Keuangan
 - 2) Pengadministrasi Persuratan
 - 3) Bendahara
 - 4) Pengelola Barang Milik Negara
 - 5) Pengemudi
 - 6) Teknisi Sarana dan Prasarana
 - 7) Pranata Barang dan Jasa
 - 8) Pengadministrasi Pustakawan
 - 9) Pranata Kearsipan
 - 10) Ajudan
- c) Kepala Subbagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
 - 1) Analis SDM Aparatur
 - 2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - 3) Pengelola Kepegawaian

4. Unsur Pelaksana:

- a) Unsur Jabatan Fungsional Kelompok Hakim Militer.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Struktur Organisasi Dilmil I-07 Balikpapan

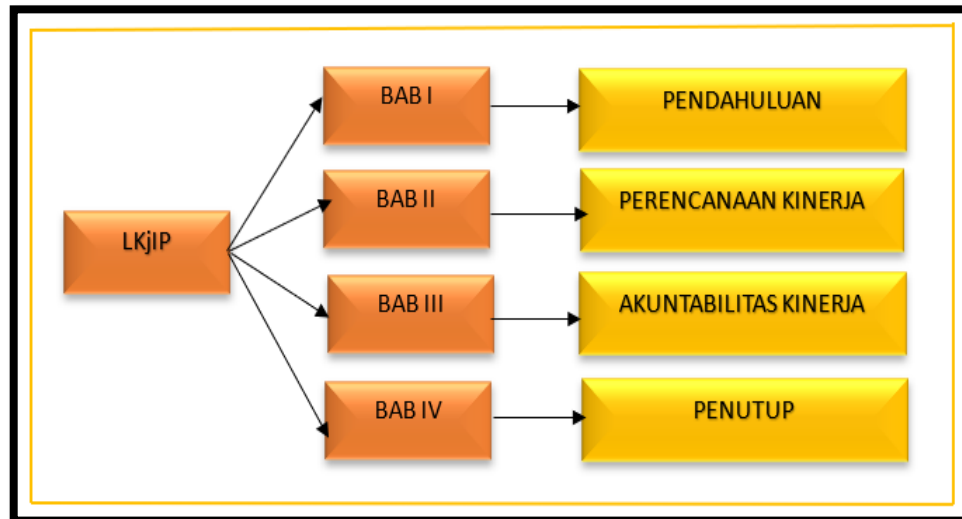
E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya sebagai berikut:

Bagan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menggambarkan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi, kedudukan, wewenang dan fungsi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis jangka menengah, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 5) Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 6) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran DIPA yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang - undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 - 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi, Misi dan Motto

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan berisikan cita - cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Adapun Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang Agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

c. Motto

Motto Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah: **“RADJA”**

R : Responsif

A : Akuntabel

D : Disiplin

J : Jujur

A : Adil

2. Tujuan

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 3 menyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:

553/SEK/01/2014 tanggal 19 Desember 2014 dan sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2020 - 2024 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan uraian secara umum sebagai berikut:

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan Peradilan untuk mencari keadilan.

3. Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah bagaimanayang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (Teknis Yudisial) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*) dengan memperhitungkan setiap unsur (*variable*) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan tiga langkah penting yaitu:

a. Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut:

- 1) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Berperilaku Adil
- 3) Berperilaku jujur
- 4) Berperilaku Bijaksana
- 5) Bertanggung Jawab
- 6) Menjunjung tinggi harga diri
- 7) Berintegritas Tinggi
- 8) Berdisiplin Tinggi
- 9) Berperilaku Rendah Hati
- 10) Bersikap Mandiri
- 11) Bersikap Profesional

Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020–2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
Setiap pencari keadilan dapat menjangkau dan mencari keadilan	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Tabel Deskripsi hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

b. Penetapan Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.
- 2) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- 3) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas.
- 4) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Ketiga sasaran tersebut di atas merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam tahun 2020 - 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengusulkan program yang dituangkan di dalam DIPA sebagai berikut:

- 1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
- 2) Program Dukungan Manajemen.

4. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020–2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepa waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Hukum Banding	perkara yang diselesaikan		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Penilaian kepuasan dari para stakeholder	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	f. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Reviu Rencana Strategis 2020 -2024 menguraikan pelaksanaannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyuusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan RPJM 2020 - 2024. Adapun Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Reviu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	90%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Perjanjian Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah membuat Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan

RPJM 2020 - 2024. Adapun Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Reviu Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %

Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	91,14%	95,94%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	100%	133%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	80%	94,12%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	99,91%	105%

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pengukuran Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

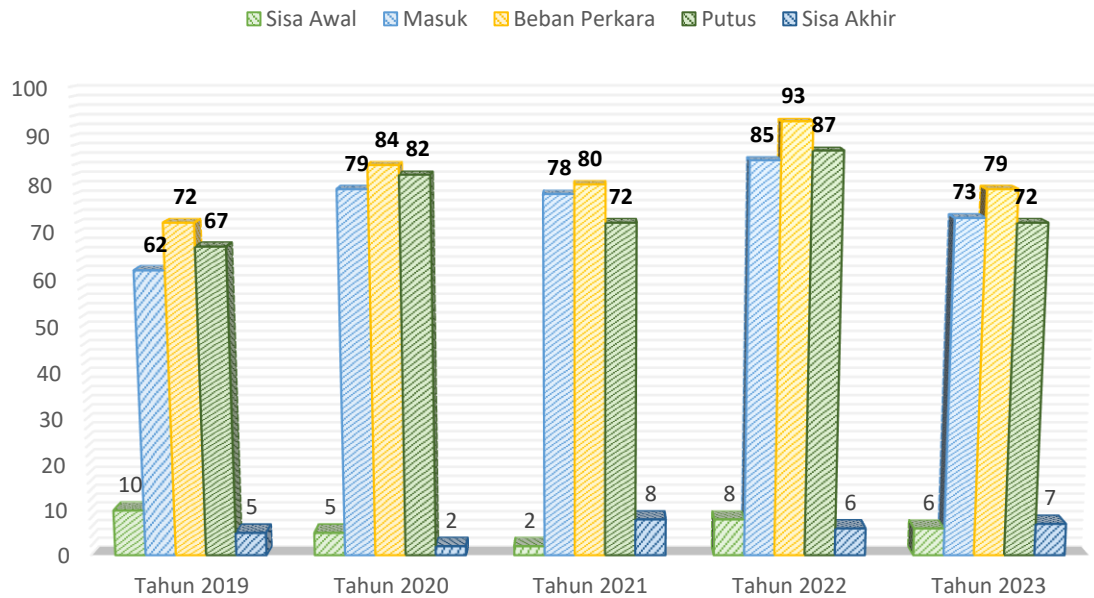
No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105,3%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	86,11%	114,8%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	84,72%	99,7%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	98,77%	104%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%

Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023

Tahun	Sisa Awal	Masuk	Beban Perkara	Putus	Sisa Akhir	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2019	10	62	72	67	5	-
2020	5	79	84	82	2	-
2021	2	78	80	72	8	-
2022	8	85	93	87	6	-
2023	6	73	79	72	7	-

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023



Analisi Akuntabilitas

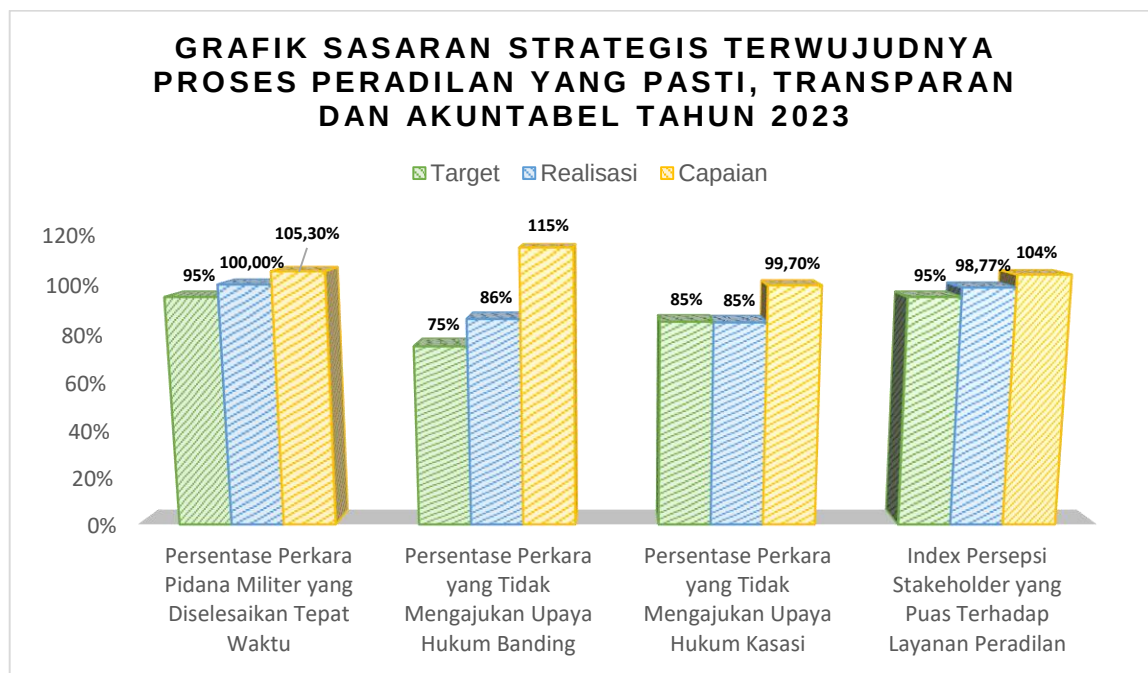
Pada tahun anggaran 2023, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya di ukur dengan mengaplikasikan 9 (sembilan) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah di capai dengan baik sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

SASARAN 1

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%
2.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding	75%	86,11%	114,8%
3.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Kasasi	85%	84,72%	99,7%
4.	Index Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan	95%	98,77%	104%



Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan Tepat Waktu.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target. Pada tahun 2022 masih terdapat sisa perkara sebanyak 6 (enam) perkara jadi jumlah beban perkara pidana militer yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara dan di putus sebanyak 60 (enam puluh) perkara. Sedangkan perkara pelanggaran lalu lintas yang ditangani sebanyak 12 (dua belas) perkara dan di putus sebanyak 12 (dua belas) perkara. Total perkara

yang di tangani sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) perkara dan semua perkara tersebut telah di putus tepat waktu pada tahun 2023. Dengan demikian sisa perkara tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) perkara dan akan diputus pada tahun 2024.

Berikut tabel data keadaan perkara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Keadaan Perkara Tahun 2023

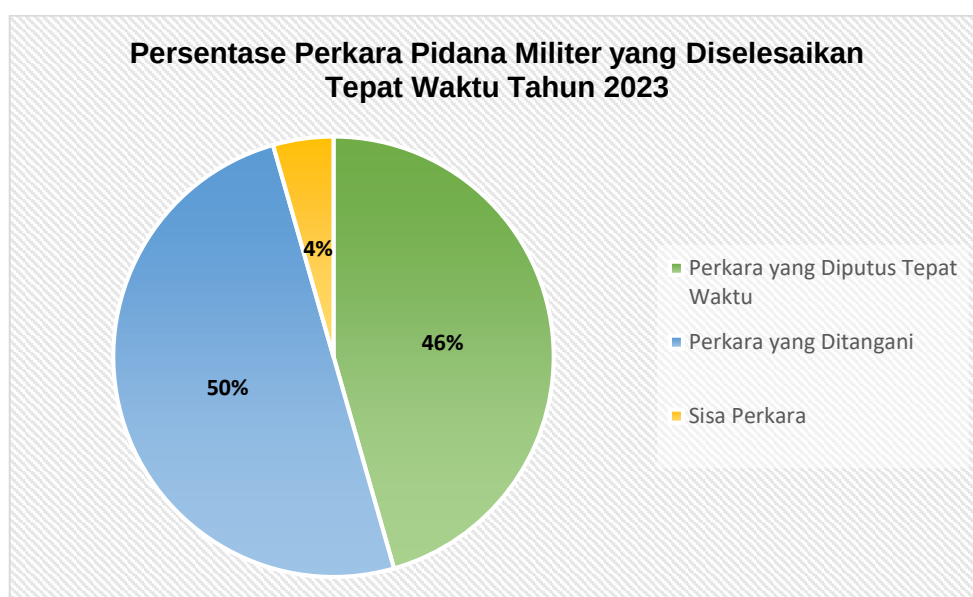
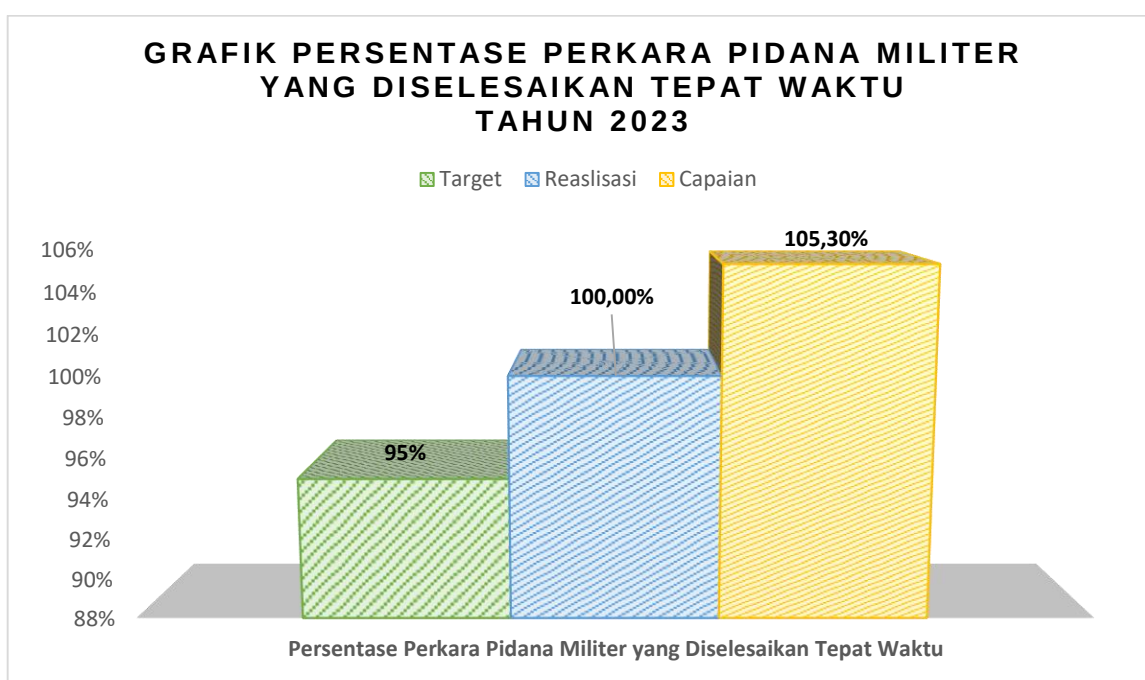
Bulan	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	6	10	3	13
Februari	13	4	7	10
Maret	10	2	6	6
April	6	4	5	5
Mei	5	4	4	5
Juni	5	9	3	11
Juli	11	9	12	8
Agustus	8	9	10	7
September	7	4	3	8
Oktober	8	6	8	6
Nopember	6	10	3	13
Desember	13	2	8	7
Jumlah		73	72	

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

Target persentase penyelesaian perkara sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) pada tahun 2023 telah terpenuhi, dengan perhitungan persentase bahwa jumlah sisa perkara tahun 2022 adalah 6 (enam) perkara, jumlah perkara masuk tahun 2023 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) perkara, sehingga jumlah beban perkara yang ditangani tahun 2023 adalah berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) perkara sedangkan perkara yang di putus tepat waktu berjumlah 72 (tujuh puluh dua) perkara. Dengan demikian persentase realisasi penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2023 mencapai 91,14% (Sembilan puluh satu koma empat belas persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah terpenuhi dengan capaian 95,94% (Sembilan puluh lima koma Sembilan puluh empat persen) sesuai target tahunan 95% (Sembilan puluh lima persen).

Berikut tabel dan grafik pencapaian target kinerjanya tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Persentase Perkara Pidana Militer yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,3%



Berdasarkan data dan penjelasan tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah tercapai dengan persentase capaian 105,3% (Seratus lima koma tiga persen). Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah terpenuhi dengan target 95% (Sembilan puluh lima persen).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

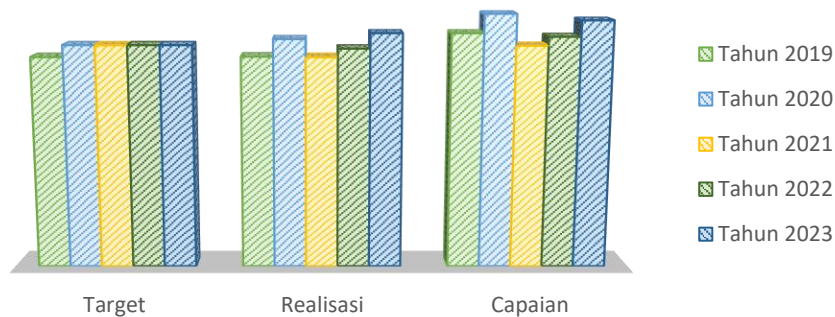
Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023, dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan pada tahun 2023, berikut adalah perbandingan pencapaian target kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90,19%	100%	95%	97,56%	108%	95%	90%	94,74%	95%	93,55%	98,48%	95%	100%	105,30%	Pencapaian Kinerja Telah Terpenuhi

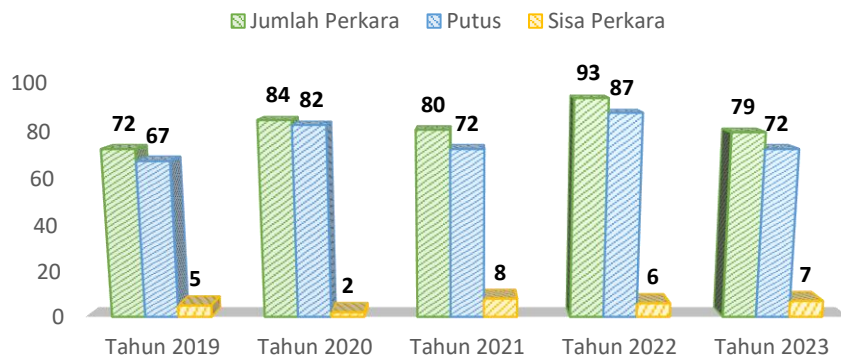
Tabel Pencapaian Target Kinerja

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE
PENYELESAIAN PERKARA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	90%	95%	95%	95%	95%
Realisasi	90,19%	97,56%	90%	93,55%	100,00%
Capaian	100%	108%	94,74%	98,48%	105,30%

**GRAFIK PERBANDINGAN
PENYELESAIAN PERKARA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN
2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**



	Pidana Militer Tahun 2019	Pidana Militer Tahun 2020	Pidana Militer Tahun 2021	Pidana Militer Tahun 2022	Pidana Militer Tahun 2023
Jumlah Perkara	72	84	80	93	79
Putus	67	82	72	87	72
Sisa perkara	5	2	8	6	7

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis, dimana target telah tercapai dan telah terpenuhinya target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	20221	2022	2023	2024		
Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	97,56 %	90 %	93,55 %	100 %	-	95%	Pencapaian target kinerja 2023 belum memenuhi target jangka menengah

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional (Standar Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan Standar Nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Penyelesaian perkara sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut terlihat pada tabel monitoring penyelesaian perkara tahun 2023 sebagai berikut:

No	Tahun	Putus < 3 Bulan	Putus 4-5 Bulan	Putus 6-12 Bulan	Putus > 12 Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	2023	73	0	0	0	Target SEMA No 2 2014 Terpenuhi

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target kinerja pada dokumen Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung belum tercapai dengan persentase target 100% (serratus persen) sedangkan untuk target satker tercapai dengan capaian 105,3% (serratus lima koma tiga persen), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu	90%	95%	100%	105,3%	Target tercapai melebihi Target MA

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2023 belum memenuhi target jangka menengah sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen). Persentase target jangka menengah tersebut realistis dengan mempertimbangkan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan dan atau pertriwulan terkait capaian kinerja di bidang penyelesaian perkara, administrasi perkara dan adminsitasi umum lainnya sehingga berguna untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.

Keberhasilan Capaian pada indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang diselsaikan tepat waktu tidak terlepas dari kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Hanya saja dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia dibidang Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 terbatas sekali, terdiri dari 3 (tiga) Hakim Militer. Untuk jabatan di kepaniteraan terdiri dari 1 (satu) orang Panitera berpangkat Mayor (tidak melaksanakan sidang), sedangkan Panmud Hukum dan Panmud Pidana masih kosong, Panitera Pengganti 2 (dua) orang. Sehingga yang melaksanakan sidang Hakim Militer 3 (tiga) orang dan Panitera Pengganti 2 (dua) orang. Namun demikian pelaksanaan target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik walaupun belum sesuai dengan target kinerja tahunan dan belum mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselsaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil, Pada bagian Kepaniteraan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis terdiri dari 1 (satu) Panitera, 2 (dua) Panitera Pengganti sedangkan jabatan Panmud Hukum dan Panmud Pidana masih kosong. Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara

dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan bahkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu bisa memenuhi target kinerja tahunan dan mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat di lihat bahwa Sumber Daya Manusia terbagi atas tenaga teknis dan non teknis yang meliputi Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Adapun data pegawai berdasarkan jabatan dan sebaran personel TNI maupun ASN pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

No	Kelompok Jabatan	Jabatan	Jumlah (Personel)	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.
I	Teknis	Kepala	1	TNI
		Wakil Kepala	-	-
		Pokkimmil	3	TNI
		Panitera	1	TNI
		Panmud Pidana	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Perkara (Staf)	2	TNI/ASN
		Analisis Perkara Peradilan (Staf)	-	-
		Panmud Hukum	-	-
		Pengadmin Hukum (Staf)	-	-
		Pengadmin Reg Perkara (Staf)	-	-
		Pengelola Data Informasi dan Hukum (Staf)	-	-
		Panitera Pengganti	2	TNI
II	Non Teknis	Sekretaris	1	TNI
		Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1	ASN
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Staf)	-	-
		Pengelola Sistem dan Jaringan (Staf)	1	ASN
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1	ASN (Pit)
		Penyusun Laporan Keuangan (Staf)	-	-
		Bendahara (Staf)	1	ASN
		Pengelola daftar gaji	-	-
		Pengadministrasian Keuangan	1	ASN
		Pengelola Barang Milik Negara (Staf)	-	-
		Pranata Barang dan Jasa (Staf)	-	-
		Pranata Kearsipan (Staf)	-	-
		Pengadmin Persuratan (Staf)	-	-
		Pengadmin Pustakawan (Staf)	-	-

		3.	4.	5.
		Teknisi Sarana dan Prasarana (Staf)	-	-
		Ajudan (Staf)	-	-
		Pengemudi (Staf)	-	-
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	ASN
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Staf)	-	-
		Analisis Kepegawaian	1	ASN
		Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Staf)	-	-
		Pengelola Kepegawaian (Staf)	-	-

Sumber Data: Subbagian Kepegawaian dan Ortala Dilmil I-07 Balikpapan Tahun 2023

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima diantaranya diaplikasi dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dengan usaha dan kerja keras dari seluruh aparaturnya dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mendapatkan WBK. Semoga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun yang akan datang dapat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), walaupun Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tetapi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkannya serta selalu menjaga integritas.

Beberapa program kerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam mendukung capaian kinerja tahun 2023 antara lain:

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya hukum Banding.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang di putus pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan.

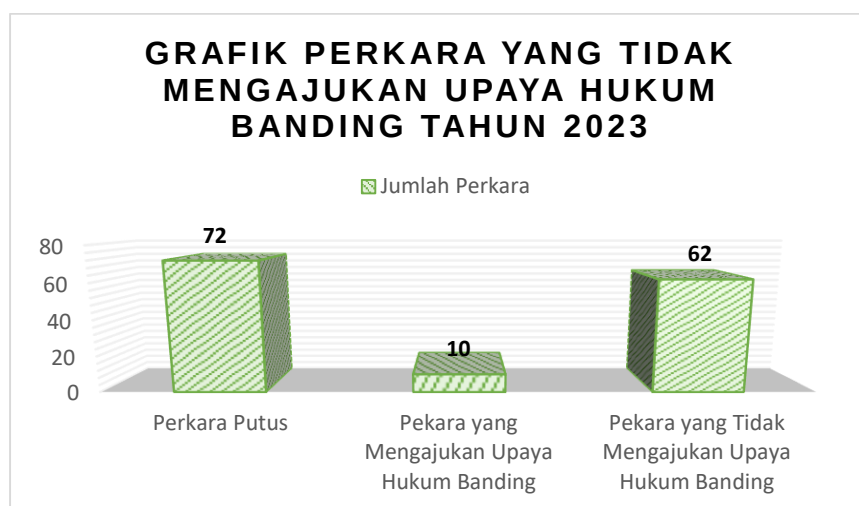
Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Banding pada tahun 2023 telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	86,1%	114,8%

Tabel Perkara yang Mengajukan dan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2023

Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
1	2	3
72	10	62

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023



Pada tabel dan grafik Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2023 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2023 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, dari jumlah perkara yang diputus tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 10 (sepuluh) perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara dengan persentase pencapaian target 86,11% (delapan puluh enam koma sebelas persen).

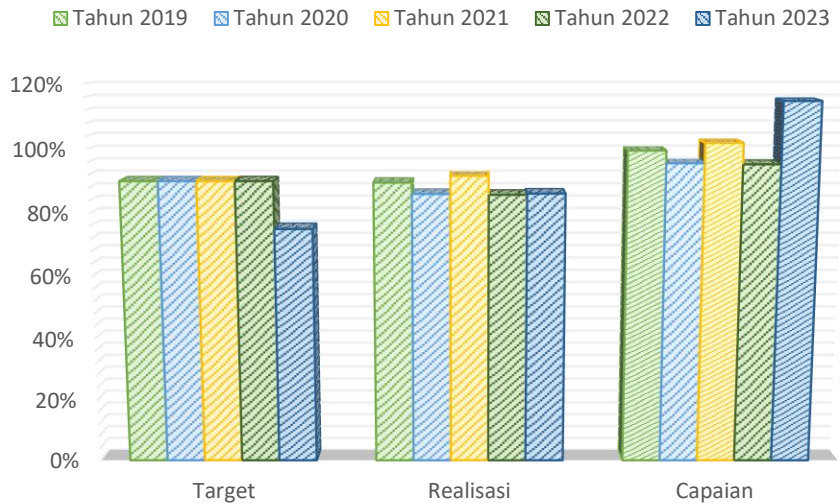
b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023, dapat dilihat perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan pada tahun 2023, berikut adalah perbandingan pencapaian target kinerja dan capaian kinerja sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	89,55%	99,5%	90%	86%	95,56%	90%	91,68%	101,87%	90%	85,71%	95,23%	75%	86,11%	114,80%	Pencapaian Kinerja Telah Terpenuhi

Tabel Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE
PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA
HUKUM BANDING TAHUN 2019 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023**



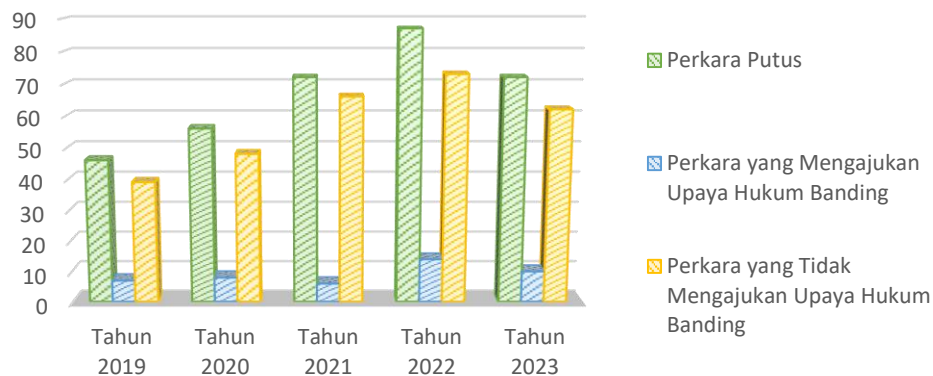
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	90%	90%	90%	90%	75%
Realisasi	89,55%	86%	91,68%	85,71%	86,11%
Capaian	99,50%	95,56%	101,87%	95,23%	114,8%

**Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019
Sampai Dengan Tahun 2023**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding
1.	2.	3.	4.
2019	46	7	39
2020	56	8	48
2021	72	6	66
2022	87	14	73
2023	72	10	62

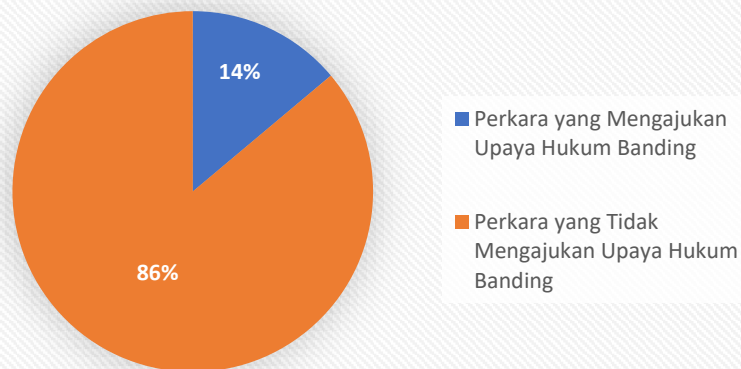
Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

**GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<i>Perkara Putus</i>	46	56	72	87	72
<i>Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding</i>	39	48	66	73	62
<i>Perkara yang mengajukan Upaya hukum banding</i>	7	8	6	14	10

**Rasio Perkara Yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum Banding Tahun 2023**



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 mengalami penurunan persentase pencapaian dibandingkan dengan tahun 2022, terlihat pada tabel dan grafik diatas bahwa pada tahun 2023 dari 72 (tujuh puluh dua) perkara putus terdapat 10 (sepuluh) perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding,

“Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan”.

Berikut data perkara yang mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023:

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara yang mengajukan Upaya hukum Banding	Pemohon Banding
1.	7-K/PM.I-07/AD/II/2023	Insubordinasi	Oditur Militer
2.	55-K/PM.I-7/AD/XI/2022	Pemalsuan Surat	Oditur Militer
3.	58-K/PM.I-07/AD/XII/2022	Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya Dan Kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Oditur Militer
4.	56-K/PM.I-07/AD/XII/202	Secara sendiri-sendiri militer, dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya, mengakibatkan mati	Oditur Militer
5.	1-K/PM.I-07/AD/II/2023	Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Terdakwa
6.	2-K/PM.I-07/AD/II/2023	Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya Dan Kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Terdakwa
7.	15-K/PM.I-07/AD/III/2023	Desersi dalam waktu damai	Oditur Militer
8.	14-K/PM.I-07/AD/II/2023	Insubordinasi Yang Mengakibatkan Luka	Oditur Militer
9.	10-K/PM.I-07/AD/II/2023	Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya Dan Kedua: Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Terdakwa
10.	30-K/PM.I-07/AD/VI/2023	Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia	Oditur Militer

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

Dari 10 (sepuluh) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding tersebut terdapat 2 (dua) perkara yakni perkara narkoba dan perkara kejahatan terhadap kesusilaan yang dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer. Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memutus perkara dengan seadiladilnya, akan tetapi rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga upaya hukum Banding merupakan jalan yang di jamin oleh undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya upaya hukum Banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding sampai dengan tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	20221	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	86 %	91,68 %	85,71 %	86,11 %	-	75%	Pencapaian target kinerja 2023 melebihi Presentase Target Jangka Menengah

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada tahun 2023 telah mencapai target tahunan dan bahkan melebihi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Seperti sudah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut

sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga upaya hukum Banding merupakan jalan yang dijamin oleh undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya upaya hukum Banding merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer yang tidak bisa dihindari. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian target kinerja pada tahun 2023 terpenuhi bahkan melebihi persentase target kinerja jangka menengah dengan capaian 86,11% (delapan puluh enam koma sebelas persen) dengan rincian perkara yang diputus sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, 62 (enam puluh dua) perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding dan 10 (sepuluh) perkara mengajukan upaya hukum Banding. Dari rincian tersebut terlihat bahwa target kinerja pada tahun 2023 telah melebihi persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Persentase capaian kinerja tersebut menjadi tolak ukur sehingga capaian target kinerja jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

D. Membandingkan Realisasi Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Target kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 75%, perbandingan target, realisasi dan capaian tersebut dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50%	75%	86,11%	114,8%	Target MARI dan Target Satker tercapai

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Adapun faktor penyebab keberhasilan banyaknya jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah karena Masyarakat atau anggota TNI yang berperkara dan Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan. berubah-ubah karena adanya TPM atau mutasi Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana Militer di dalam persidangan sehingga terwujud produk putusan yang berkeadilan.

Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum Banding guna mendapatkan rasa keadilan tersebut. Dengan adanya perkara yang mengajukan upaya hukum Banding bukan merupakan suatu kegagalan, hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat dan pencari keadilan semakin meningkat.

Sebagai upaya untuk mencegah tingginya upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak. Kepala Pengadilan selaku Pimpinan melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap bulan dan atau pertriwulan terkait capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Salah satunya capaian kinerja terkait upaya hukum baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Oditur Militer sebagai bahan evaluasi Majelis Hakim dalam menghasilkan produk putusan yang berkeadilan sesuai dengan pakta persidangan dan norma hukum yang berlaku.

Salah satu rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tersebut adalah mengusulkan dan mengikutsertakan para Hakim Militer termasuk Kadilmil, Panitera dan Panitera Pengganti untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi teknis Peradilan yang diselenggarakan Badan Diklat Mahkamah Agung RI tahun 2023.

F. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Banding tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Di lihat dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan 2 (dua) Panitera Pengganti. Komposisi jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut sepanjang tahun berjalan dan berubah - ubah karena adanya TPM atau mutasi Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja.

Terbukti dengan komposisi tenaga teknis yang ada tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani tahun 2023 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, dari jumlah perkara yang di putus tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Dengan demikian produk putusan dan pelayanan yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan kepada para pencari keadilan, sehingga target kinerja pada indikator Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding tercapai sesuai target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

G. Analisis Program Atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Peningkatan kompetensi tenaga teknis yaitu Hakim Militer dan Panitera Pengganti merupakan salah satu solusi kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 dengan mengusulkan dan mengikutsertakan tenaga teknis peradilan tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun MARI, Dilmiltama dan Dilmilti I Medan. Dengan Kegiatan tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap wawasan, ilmu serta kinerja dalam penyelesaian perkara dan menghasilkan produk putusan yang berkeadilan dan pelayanan yang berkualitas sehingga kepuasan para pencari keadilan terpenuhi.

Berikut data personil Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mengikuti beberapa Diklat yang dilaksanakan dalam rangka Diklat pembinaan teknis yaitu dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilmiltun MA RI, Dilmiltama dan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI selama tahun 2023 seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Nama	Diklat	Penyelenggara
1	Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P Kepala	Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Undangan FGD - Implementasi Wewenang KY	Balitbangkumdil MA RI (4 September 2023)
		Webinar capaian Kerjasama MA RI dengan FCFOA dalam peningkatan akses keadilan	Wakil Ketua Ma Bidang Yudisial (26 September 2023)
		Pembinaan teknis dan Administrasi Yudisial	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (9 Oktober 2023)
2	Suradi Sungkowatmojo, S.H Letnan Kolonel Chk 2910013780370 Pokkimmil Gol.V	Bimtek hakim militer TA 2023	Ditjenbadimiltun MA RI (20 s.d 22 Februari 2023)
		Pelatihan teknis yudisial humaniter TA 2023	Ditjenbadimiltun MA RI (27 Maret s.d 7 April 2023)
		Rakorniskum TNI TA 2023	Mabes TNI (16 Maret 2023)
		Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah	Ditjenbadimiltun MA RI (6 April 2023)

		Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	
		Webinar Perayaan Hari Perempuan Internasional, Hari Hakim Perempuan Internasional dan Hari Kartini 2023	MA RI (14 April 2023)
		Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Undangan FGD - Implementasi Wewenang KY	Balitbangkumdil MA RI (4 September 2023)
		Webinar capaian Kerjasama MA RI dengan FCFOA dalam peningkatan akses keadilan	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (26 September 2023)
		Pelatihan Kehumasan Pengadilan Tahun 2023	Ditjenbadimiltun MA RI
		Pembinaan teknis dan Administrasi Yudisial	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (9 Oktober 2023)
3	Dendi Sutyoso S. Saputro S.H Letnan Kolonel Chk 21940113631072 Pokkimmil Gol.V	Pembinaan teknis dan Administrasi Yudisial	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (9 Oktober 2023)
		Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilu Peradilan Militer	Ditjenbadimiltun MA RI (6 s.d 18 November 2023)
4	Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk 11070050331282 Pokkimmil Gol.VI	Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 dengan judul " Penerapan Restorative Justice Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"	Balitbangkumdil MA RI (10 Mei 2023)
		Bimtek kesetaraan gender bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum	Ditjenbadimiltun MA RI (24 s.d 26 Mei 2023)
		Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Pembinaan bimtek yudisial oleh Pimpinan MA RI	MA RI (6 Juli 2023)
		Bimtek Hakim Militer TA 2023	Ditjenbadimiltun MA RI (6 s.d 8 September 2023)
		Undangan FGD - Implementasi Wewenang KY	Balitbangkumdil MA RI (4 September 2023)
		Pembinaan teknis dan Administrasi Yudisial	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (9 Oktober 2023)
5	Tamrin, S.H Mayor Chk 21960347280475 Panitera	Pembinaan dan Monitoring implementasi aplikasi E-Berpadu	SEKMA RI (16 Januari 2023)
		Pembinaan Dan Monitoring Implementasi Aplikasi E-Berpadu	Mahkamah Agung 16 Januari 2023
		Sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 tentang kitab UU Hukum Pidana	Dilmilti I Medan (31 Januari 2023)

		Sosialisasi Peraturan MA terkait administrasi dan persidangan perkara perdata dan pidana pada pengadilan TK Pertama, Banding, Kasasi dan PK secara elektronik	MA RI (20 Februari 2023)
		Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court Versi 5.0.0	BUA MA RI (4 April 2023)
		FGD Harmonisasi Peraturan dan Sinergitas Penegakan Kode Etik Hakim Militer dan Panitera Militer antara Komisi Yudisial RI dan Bawas MA RI Selaku Anjum	Pusbang Hukum dan Peradilan MA RI (5 April 2023)
		Webinar Perayaan Hari Perempuan Internasional, Hari Hakim Perempuan Internasional dan Hari Kartini 2023	MA RI (14 April 2023)
		Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 dengan judul " Penerapan Restorative Justice Dalam Penjatuhannya Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"	Balitbangkumdil MA RI (10 Mei 2023)
		Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Bimtek panitera atau PP Peradilan Militer TA 2023	Ditjenbadimiltun MA RI (2 s.d 4 Agustus 2023)
		Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Tinjau Perbaikan Kode Persediaan	BUA MA RI (29 Agustus 2023)
		Undangan Sosialisasi Persiapan Implementasi TTE Tersertifikasi pada SAKTI Tahap III	KPPN Balikpapan (29 Agustus 2023)
		Bimtek kepaniteraan	Kadilmiltama (20 s.d 23 September 2023)
		Pembinaan teknis dan Administrasi Yudisial	Wakil Ketua MA Bidang Yudisial (9 Oktober 2023)
		Peningkatan kompetensi SDM (Tenaga Teknis Kepaniteraan)	Ditjenbadimiltun MA RI (18 s.d 20 Oktober 2023)
6	Suharto Pembantu Letnan Satu 21950303131074 Panitera Pengganti	Pembinaan dan Monitoring implementasi aplikasi E-Berpadu	SEKMA RI (16 Januari 2023)
		Sosialisasi Peraturan MA terkait administrasi dan persidangan perkara perdata dan pidana pada pengadilan TK Pertama, Banding, Kasasi dan PK secara elektronik	MA RI (20 Februari 2023)

		Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court Versi 5.0.0	BUA MA RI (4 April 2023)
		Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 dengan judul “ Penerapan Restorative Justice Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”	Balitbangkumdil MA RI (10 Mei 2023)
		Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Bimtek kepaniteraan Dilmiltama “meningkatkan kompetensi SDM kepaniteraan peradilan militer di bidang adm dan persidangan perkara secara elektronik guna percepatan penyelesaian perkara”	Pengadilan Militer Utama (20 Juni s.d 22 Juni 2023)
		Bimtek teknis yudisial panitera dan pp	Balitbangkumdil MA RI (7 s.d 12 Agustus 2023)
		Bimtek kepaniteraan	Kadilmiltama (20 s.d 23 September 2023)
7	Arief Lesmono, S.H Pembantu Letnan Satu 21970058261076 Panitera Pengganti	Pembinaan dan Monitoring implementasi aplikasi E-Berpadu	SEKMA RI (16 Januari 2023)
		Sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 tentang kitab UU Hukum Pidana	Dilmilti I Medan (31 Januari 2023)
		Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2023	Ditjenbadimiltun MA RI (20 s.d 22 Februari 2023)
		Sosialisasi Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Pertama Versi 5.2.0 dan Aplikasi e-Court Versi 5.0.0	BUA MA RI (4 April 2023)
		Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 dengan judul “ Penerapan Restorative Justice Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”	Balitbangkumdil MA RI (10 Mei 2023)
		Sosialisasi Aplikasi E Berpadu	MA RI (13 Juni 2023)
		Undangan FGD - Implementasi Wewenang KY	Balitbangkumdil MA RI (4 September 2023)

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

dengan jumlah perkara yang di putus. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan Pengadilan.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

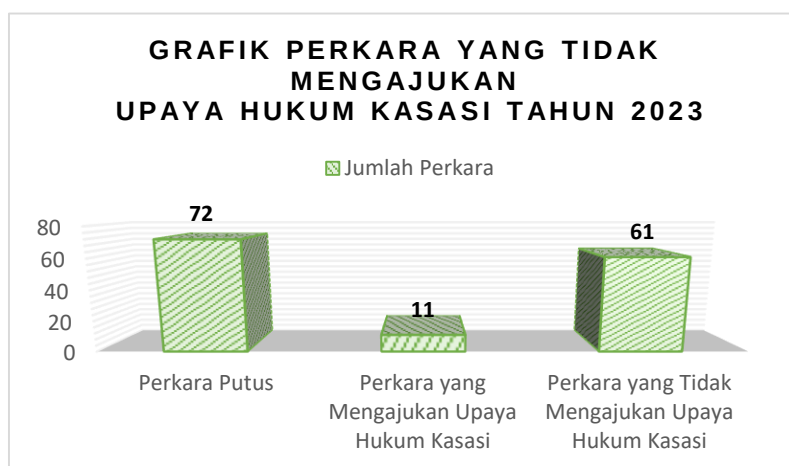
Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 telah memenuhi target dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,7% (sembilan puluh sembilan koma tujuh persen). Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi pencapaian target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85%	84,72%	99,7%

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023

Perkara Putus	Perkara Kasasi	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	2	3
72	11	61

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023



	Jumlah Perkara
Perkara Putus	72
Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	11
Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Kasasi	61

Pada tabel dan grafik Pengajuan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perkara yang di putus pada tahun 2023 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, dari jumlah perkara yang telah di putus tersebut sebanyak 11 (sebelas) perkara mengajukan upaya hukum, dengan demikian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 61 (enam puluh satu) perkara dengan Persentase capaian sebesar 99,7% (sembilan puluh sembilan koma tujuh persen).

Berikut tabel data perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023:

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi	Pemohon Kasasi
1	2	3	4
1.	43-K/PM.I-07/AL/IX/2022	Desersi dalam waktu damai	Oditur Militer
2.	49-K/PM.I-07/AL/IX/2022	Secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan	Oditur Militer
3.	7-K/PM.I-07/AD/II/2023	Insubordinasi	Oditur Militer
4.	55-K/PM.I-07/AD/XI/2022	Pemalsuan Surat	Terdakwa
5.	15-K/PM.I-07/AD/III/2023	Desersi dalam waktu damai	Oditur Militer
6.	56-K/PM.I-07/AD/XII/2022	Secara sendiri-sendiri militer, dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya, mengakibatkan mati	Terdakwa
7.	14-K/PM.I-07/AD/II/2023	Insubordinasi Yang Mengakibatkan Luka	Oditur Militer
8.	10-K/PM.I-07/AD/II/2023	Kesatu: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya Dan Kedua :Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan	Oditur Militer
9.	36-K/PM.I-07/AL/VII/2023	Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika	Oditur Militer
10.	30-K/PM.I-07/AD/VI/2023	Kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia	Oditur Militer
11.	48-K/PM.I-07/AD/X/2023	Pencurian dalam keadaan pemberatan	Oditur Militer

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat di minta oleh salah satu atau kedua belah pihak (Terdakwa/ Penuntut atau Oditur Militer) terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat Banding. Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan Kasasi bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat Banding.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pencapaian target kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 mengalami kenaikan persentase sebesar 8,31% (delapan koma tiga satu persen), karena pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 mencapai persentase 91,39% (sembilan puluh satu koma tiga puluh sembilan persen).

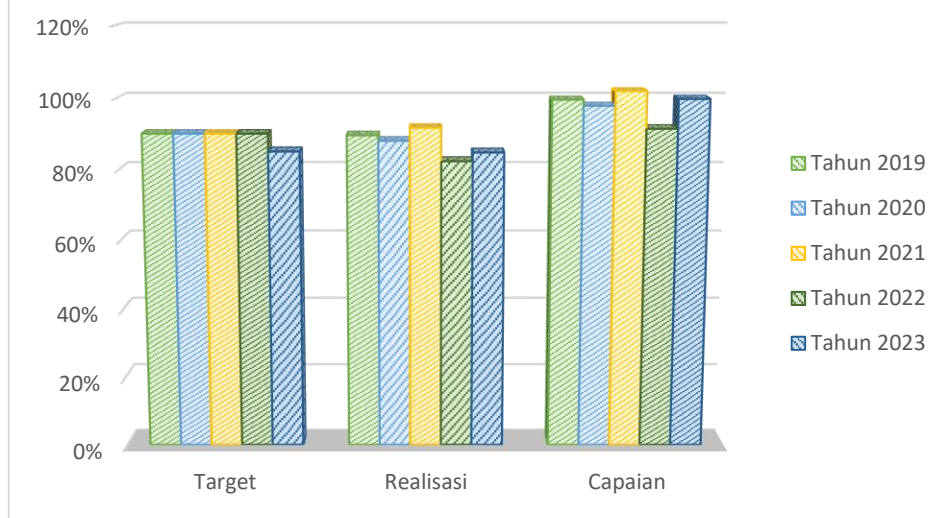
Berikut perbandingan pencapaian indikator kinerja pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada tabel dan grafik berikut:

Tabel Pencapaian Target Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	89,55%	99,5%	90%	88%	97,8%	90%	91,68%	101,87%	90%	82,25%	91,39%	85%	84,72%	99,7%	Pencapaian Kinerja Telah Terpenuhi

Tabel Pencapaian Target Kinerja

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PERKARA
YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
KASASI TAHUN 2019-2023**



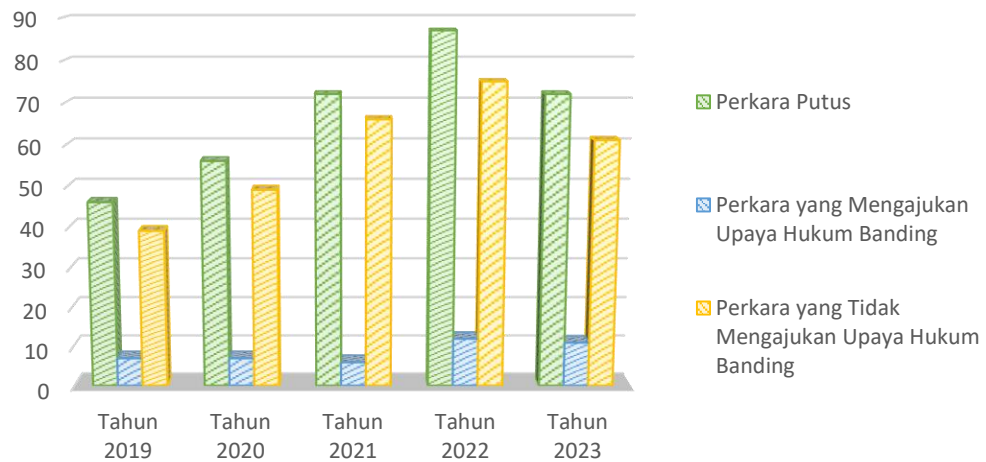
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target	90%	90%	90%	90%	85%
Realisasi	89,55%	88%	91,68%	82,25%	85%
Capaian	99,5%	97,8%	101,87%	91,39%	99,7%

**Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun
2019 Sampai Dengan Tahun 2023**

Tahun	Perkara Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi
1	2	3	4
2019	46	7	39
2020	56	7	49
2021	72	6	66
2022	87	12	75
2023	72	11	61

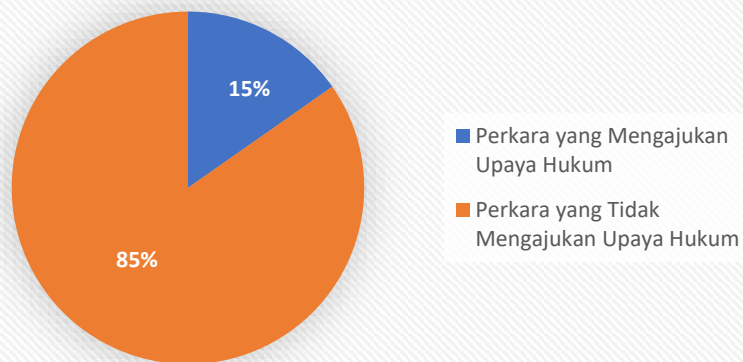
Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2019 - 2023



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Perkara Putus	46	56	72	87	72
Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi	39	49	66	75	61
Perkara yang mengajukan Upaya hukum kasasi	7	7	6	12	11

Ratio Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023



Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 mengalami penurunan persentase capaian jika dibandingkan persentase capaian pada tahun 2022 dengan

persentase capaian 99,7% (sembilan puluh sembilan koma tujuh persen). Tetapi apabila dibandingkan dengan realisasi pencapaian pada tahun 2022 yang hanya 91,39% pencapaian target kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 8,31% (delapan koma tiga satu persen). Pada tabel dan grafik tersebut dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2023 dari 72 (tujuh puluh dua) perkara yang di putus terdapat 11 (sebelas) perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, jika dibandingkan pada tahun 2019, 2020 dan tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan. “Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka menunjukkan semakin puas atas putusan Pengadilan”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	88 %	91,68 %	82,25 %	84,72 %	-	85%	Target Jangka Menengah belum terpenuhi

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 belum mencapai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan, dan realisasi pencapaian target pada tahun 2020 dan tahun 2021 sudah melebihi target jangka menengah dan memenuhi target tahunan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa rasa keadilan tersebut sangat subjektif bagi para pihak yang berperkara sehingga upaya hukum merupakan jalan yang di jamin oleh

undang-undang untuk menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, oleh karenanya upaya hukum kasasi merupakan hak bagi para pihak dalam hal ini Terdakwa dan Oditur Militer sehingga tidak bisa dihindari.

Dari rincian tersebut terlihat target kinerja pada tahun 2023 belum memenuhi persentase target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen). Di upayakan bahwa untuk capaian target kinerja jangka menengah akan dapat terpenuhi pada tahun berikutnya.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 50% sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi yakni sebesar 85%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	85%	80%	99,7%	Target MARI tercapai

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Hal ini terlihat bahwa dari 79 (tujuh puluh sembilan) perkara yang ditangani dan 72 (tujuh puluh dua) perkara yang di putus pada tahun 2023 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding 10 (sepuluh) perkara dan telah di putus

semua oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Sedangkan untuk perkara yang mengajukan Upaya Hukum Kasasi berjumlah 11 (sebelas) perkara.

Dengan demikian Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama sehingga terwujudnya pelayanan yang prima dan berkeadilan. Akan tetapi upaya hukum merupakan hak Terdakwa dan Oditur Militer sehingga rasa keadilan dirasakan sangat subjektif, puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa adil baginya dan tidak puas bagi pihak yang merasa putusan di rasa tidak adil bagi mereka sehingga mendorong salah satu pihak untuk melakukan upaya hukum guna mendapatkan rasa keadilan tersebut.

Oleh karenanya baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan upaya hukum Kasasi untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Dengan adanya perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi bukan merupakan suatu kegagalan, karena kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah jajaran Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dengan demikian perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perkara yang telah di periksa dan di putus oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah memanfaatkan penggunaan Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Ketersediaan Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang teknis pada tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan 2 (dua) Panitera Pengganti. Komposisi jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut sepanjang tahun 2023 juga berubah-ubah karena adanya TPM atau mutasi Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Terbukti dengan komposisi tenaga teknis yang ada tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus perkara yang ditangani tahun 2023 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara, dari jumlah perkara yang di putus tersebut sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara tidak mengajukan upaya hukum Banding dan 61 (enam puluh satu) perkara tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

Namun demikian baik Terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak dan menggunakan hak mereka tersebut untuk mengajukan permohonan Upaya Hukum Kasasi untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah diatur dalam KUHAP.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga teknis Hakim Militer dan Panitera Pengganti merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023. dengan mengusulkan tenaga teknis peradilan tersebut dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun MARI, Dilmiltama dan Dilmilti I Medan. Dengan Kegiatan tersebut aparaturnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan semakin kompeten di bidangnya dengan banyaknya pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh tenaga teknis peradilan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelesaian perkara

baik dari segi administrasi perkara maupun kualitas produk putusan yang bisa memenuhi rasa keadilan.

4. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Pengukuran kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dilaksanakan dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan kepada masyarakat dan anggota TNI sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan. Dengan survei kepuasan masyarakat ini diperoleh index persepsi kepuasan terhadap layanan peradilan.

Survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), 6 bulan (Semester) dan 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Namun demikian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melaksanakan survei setiap 3 bulan (triwulan) sesuai Surat Edaran Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Metode yang digunakan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran skala Likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Responden survei adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
3. Waktu Pelayanan.
4. Biaya/Tarif*).
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana**).
7. Perilaku Pelaksana**).
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.
9. Sarana dan Prasarana.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017.

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	2	3	4	5
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Babik
3.	3,0644- 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4.	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

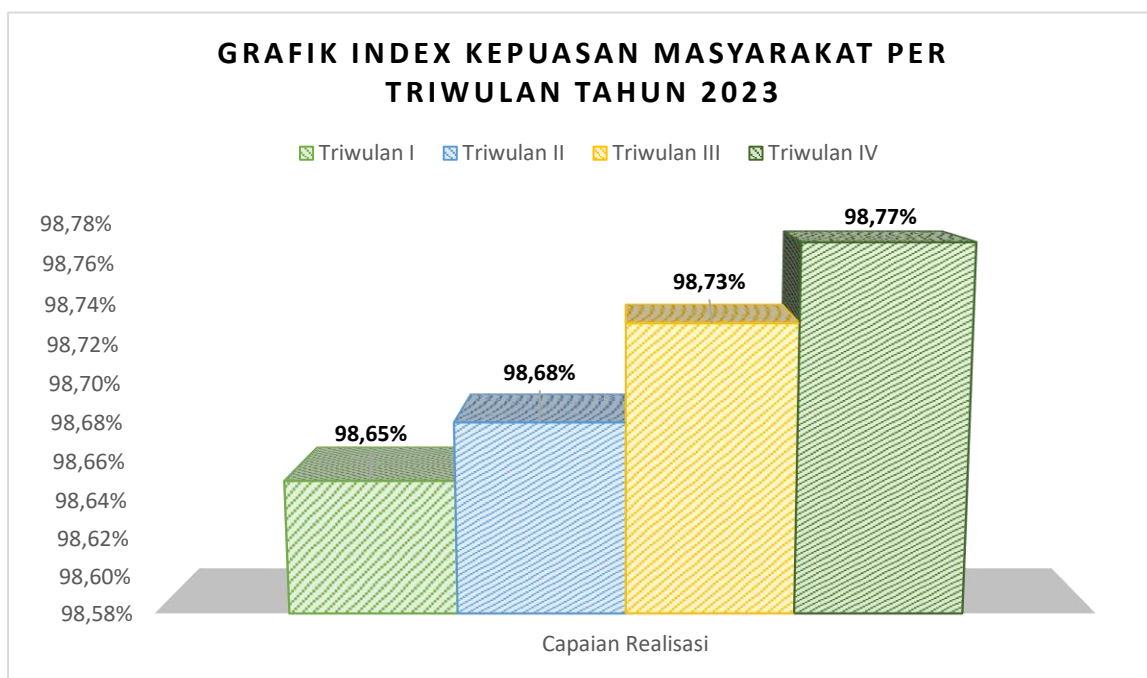
Tabel Kriteria Penilaian IKM

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tingkat capaian indikator kinerja index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan peradilan pada periode triwulan I, II, III dan triwulan IV tahun 2023 telah memenuhi target, rasio index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada triwulan IV tahun 2023 sebesar 98,77% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dengan mutu pelayanan “A” memuaskan. Realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi per triwulan capaian target index persepsi responden/stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
		TW.I 2023	TW.II 2023	TW.III 2023	TW.IV 2023	
1	2	3	4	5	6	7
Index Persepsi stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	95%	98,65%	98,68%	98,73%	98,77%	104%

Tabel Realisasi Penilaian IKM



Pada tabel dan grafik index kepuasan masyarakat tahun 2023 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa survei kepuasan masyarakat (SKM) dilaksanakan setiap triwulan, hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada setiap triwulan tersebut telah memenuhi target tahun 2023.

Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 akan diukur dengan membandingkan target dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) pada triwulan IV tahun 2023.

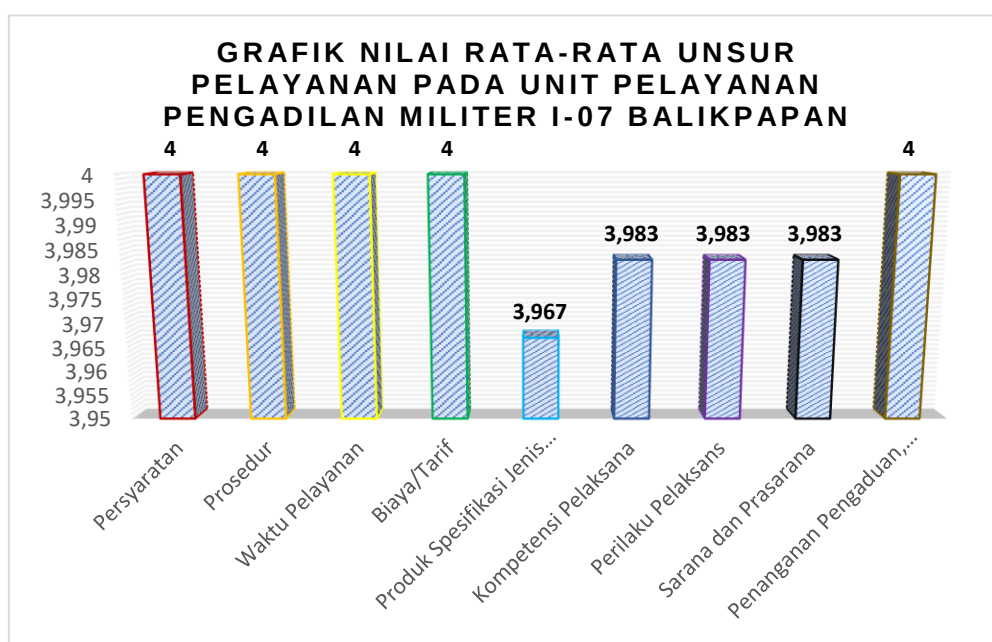
Dalam memaksimalkan kinerja sektor pelayanan public terdapat beberapa hal penting yang harus di utamakan, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh anggota

TNI atau masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat di lihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan.

Berikut tabel nilai rata-rata skor dan peringkat pada setiap ruang lingkup pengukuran index kepuasan pengguna atau masyarakat layanan Pengadilan triwulan IV tahun 2023.

No	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori
1	2	3	4
1.	Persyaratan	4,000	Sangat Baik
2.	Prosedur	4,000	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	4,000	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	4,000	Sangat Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,967	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3,983	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3,983	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	3,983	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,000	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Tertimbang		3,951	Sangat Baik
IKM Unit Pelayanan setelah di Konversi		98,77 Mutu Pelayanan "A" (Memuaskan)	

Sumber Data: Laporan SKM Periode Triwulan IV Tahun 2023



Berdasarkan data dan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) unsur pelayanan semuanya memiliki kualitas penilaian yang sangat baik, namun demikian tetap memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan untuk mempertahankan dan mendapatkan nilai yang terbaik pada periode berikutnya.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pengukuran capaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir akan diukur dengan membandingkan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan periode triwulan IV tahun 2023 dengan capaian hasil index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada triwulan IV tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan pencapaian target indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan.

Pada tahun 2022 capaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan sebesar 99,76 dengan mutu pelayanan “A” sedangkan pencapaian index kepuasan masyarakat (IKM) unit pelayanan pada tahun 2023 sebesar 98,77 dengan mutu pelayanan “A”. Berikut perbandingan pencapaian indikator Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	94,25%	99,21%	95%	99,33%	105%	95%	97,56%	103%	95%	99,76%	105%	95%	98,77%	104%	IKM unit pelayanan cenderung stabil masih diatas target 95%

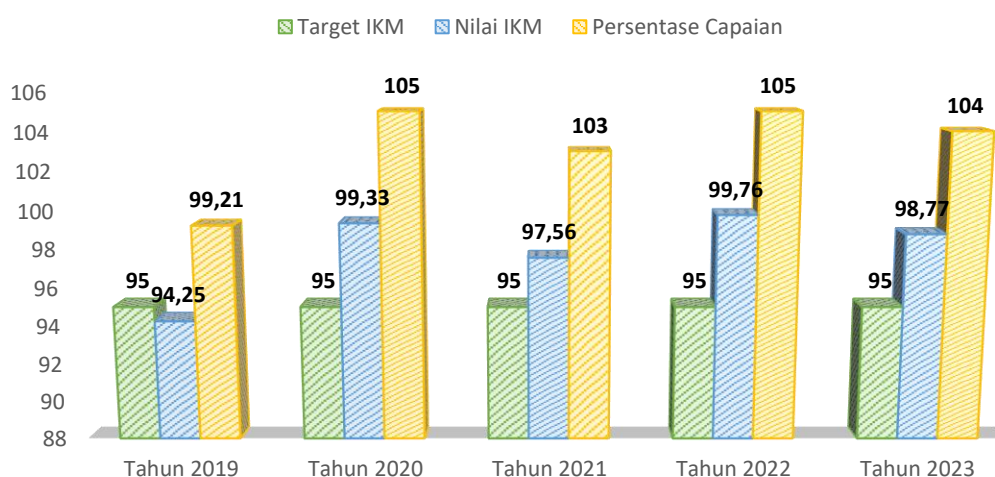
Tabel Pencapaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**Tabel Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023**

Tahun	Target IKM	Nilai IKM	Persentase Capaian
1	2	3	4
2019	95	94,25	99,21
2020	95	99,33	105
2021	95	97,56	103
2022	95	99,76	105
2023	95	98,77	104

Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Dilmil I-07 Balikpapan

**GRAFIK PERBANDINGAN INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT (IKM) TAHUN 2019 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2023**



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Target IKM	95	95	95	95	95
Nilai IKM	94,25	99,33	97,56	99,76	98,77
Persentase Capaian	99,21	105	103	105	104

Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas bahwa realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dari hasil penilaian mutu pelayanan dan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) dibandingkan tahun 2022 dan beberapa tahun sebelumnya dengan nilai IKM tahun 2023 sebesar 98,77 dengan mutu pelayanan “A” (memuaskan).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	99,33%	97,56%	99,76%	98,77 %	-	95%	Target Jangka Menengah terpenuhi

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 telah melebihi target tahunan dan telah memenuhi target jangka menengah yang telah ditetapkan. Pada tabel di atas terlihat pula bahwa capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan pada tahun 2023 dan capaian tahun 2020 dan tahun 2022 telah melebihi target index kepuasan masyarakat (IKM) jangka menengah dengan nilai index kepuasan masyarakat (IKM) yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis sebesar 95 (sembilan puluh lima) mutu pelayanan “A”. Dengan capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 akan diupayakan capaian index mutu layanan jangka menengah akan tetap dapat terpenuhi dan tercapai pada tahun berikutnya.

Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja Aparatur Pengadilan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan serta meningkatkan kompetensi Hakim, Panitera Pengganti serta aparatur

Pengadilan lainnya untuk mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan sehingga dapat menghasilkan produk Pengadilan yang berkualitas dan berkeadilan.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/Sek/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditetapkan bahwa nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus lebih dari 80.

Berdasarkan Keputusan Sekma tersebut target kinerja pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 dengan nilai IKM sebesar 80 sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target lebih tinggi dengan nilai IKM sebesar 95, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada table sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target IKM MARI	Target IKM Satker	Realisasi IKM Satker	Capaian IKM Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	95%	98,77%	104%	Target Nasional (MARI) tercapai

Dengan demikian realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 secara Nasional telah memenuhi target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Terkait Index Kepuasan Masyarakat Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Secara umum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2023 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melayani pencari keadilan. Para Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan sudah berupaya secara maksimal untuk menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana didalam persidangan sehingga terwujudnya pelayanan yang prima dan berkeadilan.

Penyediaan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi skala prioritas bagi Pengadilan dalam meningkatkan pelayanan, selain itu Pengadilan harus memberikan kemudahan-kemudahan baik terkait akses pelayanan maupun akses informasi pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membuat beberapa inovasi terkait pelayanan. Kepuasan masyarakat atau anggota TNI yang berperkara di Pengadilan dalam memperoleh informasi dan pelayanan menjadi suatu keniscayaan yang harus diwujudkan.

Dengan demikian pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara periodik oleh penyelenggara pelayanan publik yakni Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan dipergunakan oleh unit kerja untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan layanan Pengadilan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan atau peningkatan index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memperoleh penilaian sangat baik antara lain:

1. Kinerja aparatur Pengadilan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada SOP dan peraturan yang ada.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidangnya.
3. Managemant waktu yang efisien.

4. Mengintegrasikan pelayanan dari manual ke elektronik.
5. Adanya inovasi di bidang pelayanan (MELANI I-07).
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
7. Terbangunnya kesadaran, pola pikir (*mainset*) dan budaya kerja dari Kadilmil, Pokkimmil dan seluruh aparaturnya Pengadilan.
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara berkala.

Pada dasarnya hasil nilai index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah memperoleh nilai index yang sangat baik dengan mutu pelayanan “A”, namun demikian Pimpinan Pengadilan secara berkala rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait nilai unsur pelayanan yang memperoleh nilai paling rendah di antara 9 (sembilan) unsur penilaian pada survei kepuasan masyarakat. Monitoring dan evaluasi tersebut merupakan salah satu kebijakan dan solusi yang dilaksanakan untuk melakukan perbaikan kualitas layanan di Pengadilan, hasil rekomendasi dari monev tersebut akan ditindaklanjuti untuk perbaikan layanan di Pengadilan.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah memanfaatkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sebaik-baiknya sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing. Capaian pada indikator kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dengan memperoleh nilai index kepuasan “sangat baik” tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pada tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil 2 (dua) Panitera Pengganti. Komposisi jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut sepanjang tahun 2023 juga berubah - rubah karena adanya TPM Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian penanganan berkas perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dilakukan

secara proporsional, Kadilmil dan Wakadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Terbukti dengan komposisi tenaga teknis yang ada tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani tahun 2023 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara.

Begitu pula dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada bagian non teknis atau bagian Kesekretariatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia belum memenuhi kriteria standar jumlah pegawai pada Pengadilan Tipe A. Masih terdapat jabatan-jabatan kosong seperti jabatan Panmud Hukum, Panmud Pidana dan beberapa jabatan fungsional, analis dan jabatan pengelola yang belum terisi, sehingga tugas dan tanggung jawab jabatan yang kosong tersebut dikerjakan oleh pegawai yang menduduki jabatan lain.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) ini tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Salah satu contoh pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada yaitu seperti belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai khusus front office yang bertugas di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mengisi petugas pada area PTSP tersebut Kadilmil menerapkan kebijakan dengan membuat jadwal piket hari Senin sampai dengan Jum'at bagi Staf dan PPNPN secara bergiliran. Para Staf dan PPNPN yang bertugas di PTSP tersebut dilaksanakan pelatihan oleh pengawas dan penanggung jawab PTSP.

Dengan pelatihan dan sosialisasi pelayanan PTSP tersebut para Staf dan PPNPN memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan dan menguasai produk-produk layanan Pengadilan, dengan terselenggaranya pelayanan yang baik tersebut diharapkan index responden yang puas terhadap layanan

Pengadilan semakin meningkat dan dapat mempertahankan nilai index yang “sangat baik” tersebut.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima diantaranya diaplikasikan dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dengan usaha dan kerja keras dari seluruh aparatur dan komitmen yang kuat dari seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk meraih WBK. Semoga Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun yang akan datang dapat mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), walaupun Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tetapi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertekad dan berkomitmen untuk mewujudkannya serta selalu menjaga integritas.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
2. Pelaksanaan *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara.
3. Kadilmil melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Menindaklanjuti hasil laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap triwulan.

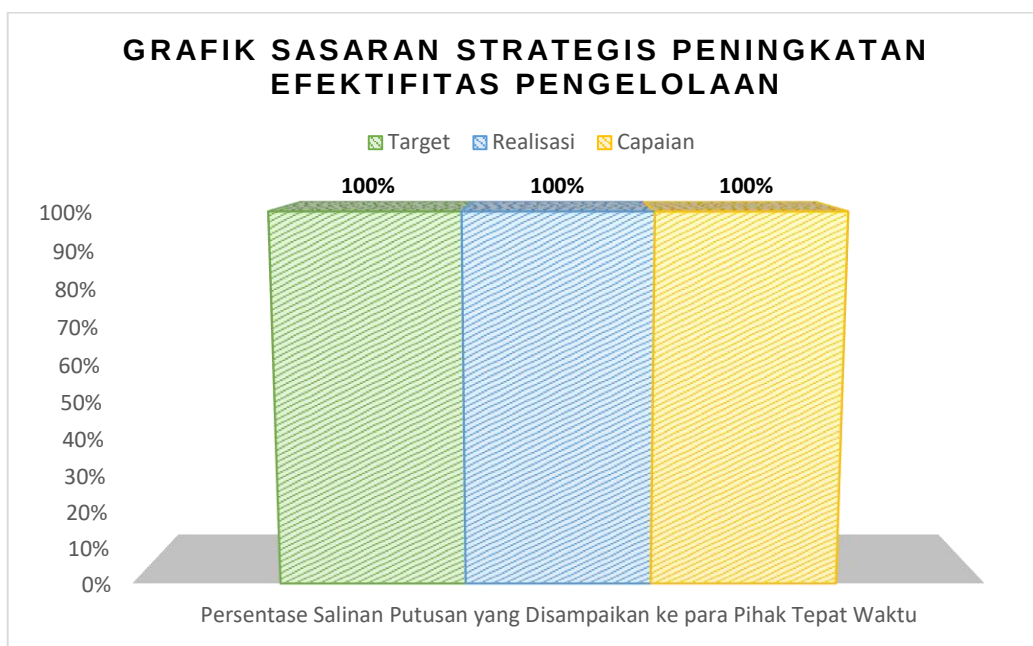
SASARAN 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA.

Pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak

tepat waktu, pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%



1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target 100%. Pencapaian target indikator kinerja ini dapat dijelaskan bahwa berkas perkara yang putus sejumlah 72 (tujuh puluh dua) perkara telah dikirimkan salinan putusan tepat waktu kepada para pihak yakni Papera, Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum dan kepada Terdakwa.

Adapun capaian target indikator tersebut digambarkan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

Berikut tabel capaian indikator kinerja pada persentase salinan putusan yang disampaikan kepada Papera, Oditur Militer, Polisi Militer, Ankum dan kepada Terdakwa tepat waktu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

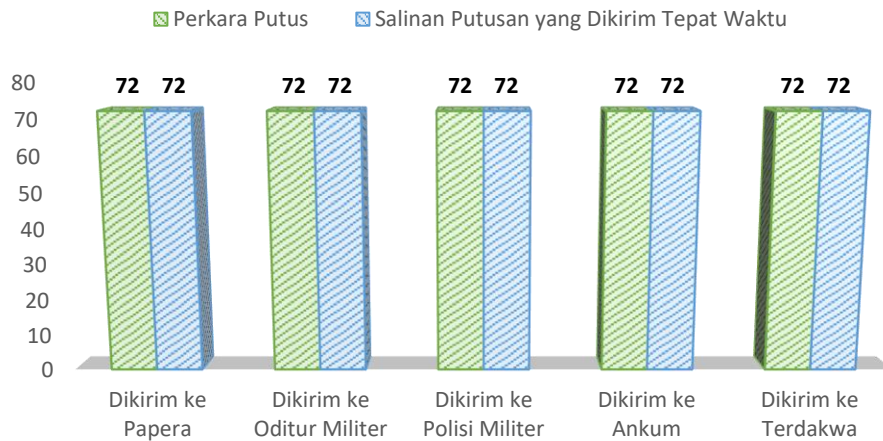
Bulan	Putus	Salinan Putusan yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	Keterangan
1	2	3	4
Januari	3	3	-
Februari	7	7	-
Maret	6	6	-
April	5	5	-
Mei	4	4	-
Juni	3	3	-
Juli	12	12	-
Agustus	10	10	-
September	3	3	-
Oktober	8	8	-
Nopember	3	3	-
Desember	8	8	-
Jumlah	72	72	

Sumber Data: Laporan Perkara Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat di lihat pada grafik sebagai berikut:

**GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN
KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU
TAHUN 2023**



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

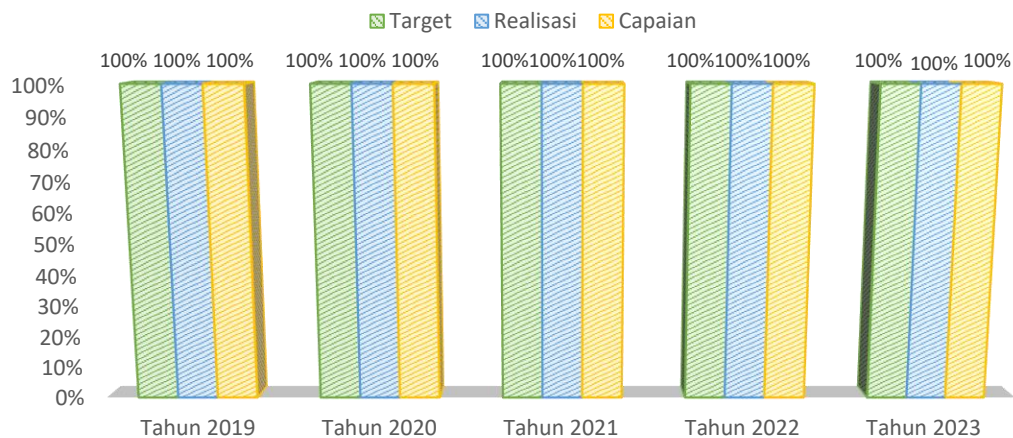
Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2023 berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang di kirim para pihak tepat waktu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yakni sebesar 100% (seratus persen).

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase Pencapaian target terpenihi

Tabel Pencapaian Target Kinerja

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE SALINAN
PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK
TEPAT WAKTU TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2023**



c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100%	Target Jangka Menengah tercapai

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan tahun 2023, tercapai sesuai target tahunan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan. Atas dasar capaian kinerja tersebut

diharapkan persentase target jangka menengah sebesar 100% akan tetap bisa tercapai pada tahun yang akan datang.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa: untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.

Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen) sedangkan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal yakni sebesar 100% (seratus persen), perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	100%	100%	100%	Target Satker tercapai

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak

e. Analisis Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tidak terlepas dari perwujudan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan publikasi perkara (*one day publish*) sehingga setelah Majelis Hakim membacakan putusannya diikuti dengan kesiapan produk putusan tersebut berupa petikan putusan dan salinan putusan untuk disampaikan kepada para pihak yaitu Papera (Perwira penyerah perkara), Oditur Militer, Polisi Militer, Anumerta (Atasan yang berhak menghukum) dan Terdakwa sesuai dengan SOP dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Hakim dan Panitera sebagai tenaga teknis Pengadilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah secara maksimal menghasilkan produk putusan berkualitas dan berkeadilan sesuai penerapan dalam KUHP dan KUHPM serta penerapan Hukum Acara Pidana di dalam persidangan tingkat pertama. Ketika putusan akhir selesai dibacakan, bagian Kepaniteraan dapat langsung memproses administrasi penyelesaian perkara sesuai SOP yang ada sehingga penyampaian salinan putusan kepada para pihak dapat terlaksana tepat waktu.

Pencapaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan capaian 100% (seratus persen) pada tahun 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan Aparatur Teknis dan Non Teknis pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan konsisten dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut berpedoman pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011.

Selain itu disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan perolehan persentase kinerja 100% tidak terlepas dari efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Ketersediaan Sumber Daya

Manusia (SDM) di bidang teknis pada tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan 2 (dua) Panitera Pengganti. Komposisi jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut sepanjang tahun 2023 juga berubah-ubah karena adanya TPM dan mutasi Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja. Dengan komposisi tenaga teknis tersebut pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyelesaikan dan memutus semua perkara yang ditangani sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara tanpa ada sisa perkara yang akan diselesaikan pada tahun 2023.

Capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan. Semua staf melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan beban kerja yang ada dan dilaksanakan sesuai SOP dan aturan yang ada. Sehingga semua beban kerja dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

Selain dukungan kinerja dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di unit kerja, capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu juga di dukung oleh ketersediaan pagu anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI khusus untuk pengiriman petikan dan salinan putusan kepada para pihak. Dengan dukungan anggaran tersebut pemenuhan target kinerja pada indikator persentase salinan

putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu akan terealisasi sesuai target tahunan yang telah ditetapkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2023 telah melaksanakan Beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2023 antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
6. Pelaksanaan *Surveillance* Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Ditjen Badilmiltun MARI.

SASARAN 3

MENINGKATKAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN.

Terwujudnya sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di ukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor Pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Pengadilan setempat.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel dan grafik sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	90%	100%	111%

1. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.

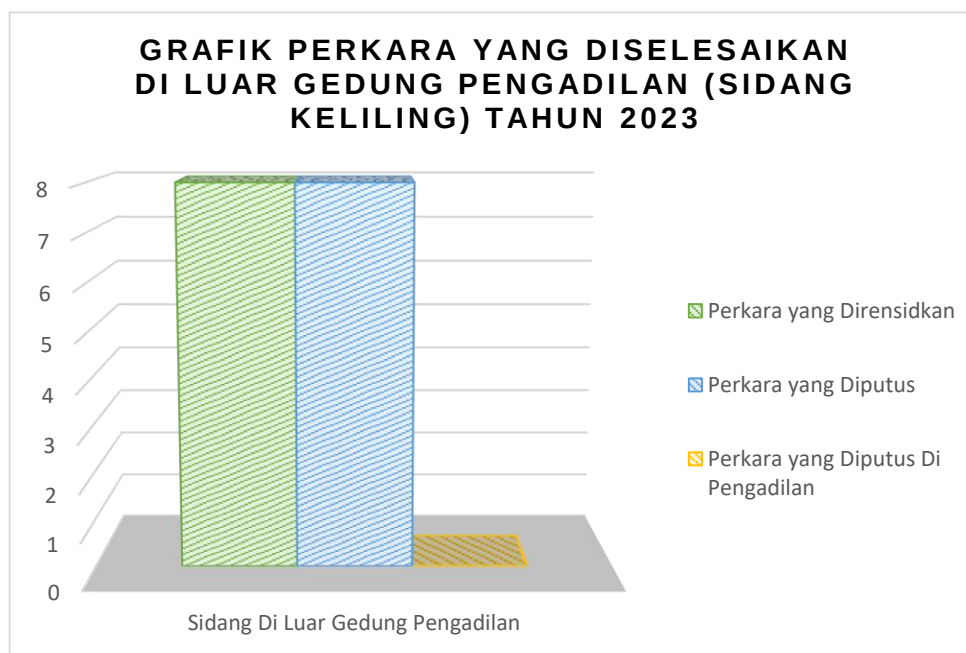
Capaian indikator kinerja pada indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada unit kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan diwujudkan dengan pelaksanaan sidang keliling yang merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara yang lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi di nilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa atau Saksi untuk menghadiri persidangan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 2 (dua) kali Pelaksanaan Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan di Kota

Samarinda bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara. Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dari kedua Pelaksanaan Sidang Keliling tersebut jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 8 (delapan) berkas perkara.

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2023 telah memenuhi target kinerja sebesar 100% (seratus persen). Perkara yang di putus pada pelaksanaan sidang keliling tersebut sebanyak 8 (delapan) perkara dari semua perkara yang dirensidkan untuk disidangkan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara Sidang Keliling Yang Diputus	Perkara Putus di Gedung Pengadilan	Ket.
1	2	3	4
8 (perkara)	8 (perkara)	-	-



b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2023 mencapai persentase realisasi 100% (seratus persen), capaian tersebut berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan beberapa tahun sebelumnya dengan capaian persentase sebesar 100% (seratus persen) akan tetapi pada tahun 2022 belum mencapai target.

Adapun perbandingannya dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut:

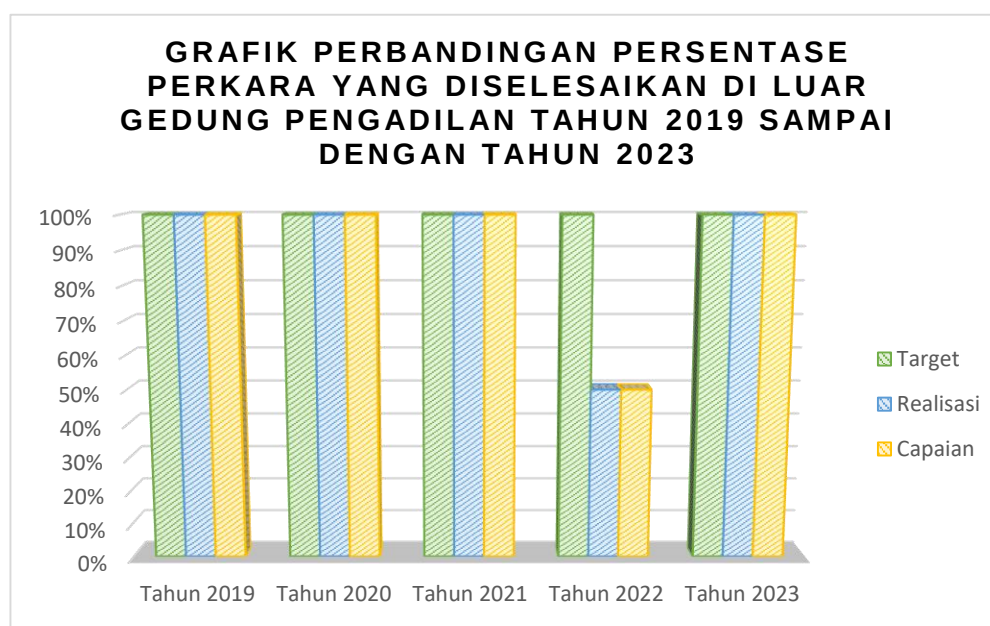
Tahun	Rensid Perkara Sidang Keliling	Perkara Putus (Sidang Keliling)	Perkara Putus di Gedung Pengadilan	Ket.
1	2	3	4	5
2019	9 Perkara	9 Perkara		
2020	5 Perkara	5 Perkara		
2021	3 Perkara	3 Perkara		
2022	4 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	
2023	8 Perkara	8 Perkara		

Tabel Perbandingan Perkara Sidang Keliling Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja secara persentase pada tahun 2023 berbanding sama dengan capaian tahun 2019, 2020, 2021, dengan capaian persentase kinerjanya 100% (seratus persen) sedangkan pada tahun 2022 capaian presentase kinerja mengalami penurunan. Pencapaian persentase tersebut dapat di lihat dari perbandingan antara jumlah perkara yang dirensidkan dengan jumlah perkara yang di putus pada pelaksanaan sidang keliling. Berikut tabel perbandingan capaian indikator kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja															Keterangan
	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	Persentase Pencapaian target terpenihi

Tabel Pencapaian Target Kinerja Sidang Keliling



	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
<i>Target</i>	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Realisasi</i>	100%	100%	100%	50%	100%
<i>Capaian</i>	100%	100%	100%	50%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perbandingan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis dapat di lihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					Target Jangka Menengah	Keterangan
	Realisasi						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	100 %	100 %	50 %	100 %	-	100%	Target Jangka Menengah sebesar 100% terpenuhi

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) pada tahun 2020, 2021 dan tahun 2023 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan, bahkan capaian persentase kinerja pada tahun 2023 telah mencapai persentase target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% (seratus persen).

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dilaksanakan sesuai Standar Nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Capaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 apabila dibandingkan secara Nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI adalah sama bahwa Mahkamah Agung RI menetapkan target pada tahun 2023 sebesar 100% demikian pula Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan target maksimal sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target MARI	Target Satker	Realisasi Satker	Capaian Satker	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	Target Satker sebesar 100% tercapai

e. Analisis Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 2 (dua) kali Pelaksanaan Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan di Kota Samarinda bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara. Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dari kedua Pelaksanaan Sidang Keliling tersebut jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 8 (delapan) berkas perkara. Pencapaian target kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut terealisasi karena tersedianya anggaran pelaksanaan sidang keliling pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI.

Pagu anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling (pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan Militer) pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan tersedianya pagu anggaran pada DIPA (05) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melakukan strategi percepatan penyelesaian perkara dengan membuat rencana sidang dan menyidangkan perkara melalui pelaksanaan sidang keliling.

Target jumlah perkara yang akan diselesaikan melalui sidang keliling pada DIPA (05) tahun 2023 ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) perkara, namun

demikian dalam pelaksanaan sidang keliling tahun 2023 tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merensidkan sebanyak 8 (delapan) perkara dan 8 (delapan) perkara tersebut semuanya disidangkan dan di putus melalui pelaksanaan sidang keliling tersebut.

Dengan demikian jumlah perkara yang di putus melalui mekanisme sidang keliling telah memenuhi jumlah target perkara sidang keliling pada DIPA (05) tahun 2023. Dengan demikian pagu yang tersedia pada DIPA (05) tersebut tercapai efektifitas karena jumlah penyelesaian perkara memenuhi target penyelesaian perkara yang tercantum pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Dengan capaian kinerja tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan dan merealisasikan program kerja anggaran yang telah direncanakan pada DIPA (05) Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Namun demikian unit kerja telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) bahwa dengan pagu anggaran yang tersedia pada DIPA (05) tahun 2023 sebesar Rp. 48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat melaksanakan sidang keliling sebanyak 2 (dua) kali saja dalam setahun, realisasi kinerja tersebut berbanding sama dengan pelaksanaan sidang keliling pada beberapa tahun sebelumnya yang hanya bisa dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun berjalan.

Mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang mencakup Wilayah Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 (empat) Kota dan 6 (enam) Kabupaten dibutuhkan peningkatan anggaran agar pelaksanaan sidang keliling dapat dilaksanakan secara periodik sehingga dapat mendukung percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung Pengadilan.

Solusi yang telah dilakukan oleh unit kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah dengan membuat perencanaan anggaran yang telah disusun dan diajukan dalam penyusunan pagu anggaran RKA-KL tahun anggaran 2024 dengan pengajuan anggaran belanja sidang keliling sebesar Rp. 53.850.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan jumlah pagu tersebut diharapkan unit kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat melaksanakan percepatan penyelesaian perkara melalui sidang keliling secara periodic.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Capaian kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan perolehan persentase kinerja 100% tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pada tahun 2023 hanya terdiri dari 4 (empat) Hakim Militer termasuk Kadilmil dan 2 (dua) Panitera Pengganti. Komposisi jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut sepanjang tahun 2022 juga berubah-ubah karena adanya TPM Hakim, Panitera dan Panitera Pengganti.

Namun demikian Sumber Daya Manusia (SDM) Hakim dan Panitera yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pembagian tugas penyelesaian perkara secara proporsional, Kadilmil juga melaksanakan persidangan sesuai komposisi Majelis Hakim yang tersedia di unit kerja sehingga mampu mewujudkan pencapaian target kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan 2 (dua) kali Sidang Keliling yang pertama dilaksanakan di Kota Samarinda bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara. Sidang Keliling yang kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023

jumlah berkas perkara yang dirensidkan sebanyak 4 (empat) berkas perkara yang bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Dengan komposisi Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, *Provoost*, Staf serta Oditur Militer tersebut dengan 8 (delapan) perkara yang dirensidkan untuk disidangkan melalui sidang keliling tersebut dapat di putus dan tidak ada perkara yang di selesaikan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tersebut tidak terlepas pula dukungan kinerja para Staf baik pada bagian Kepaniteraan maupun pada bagian Kesekretariatan yang berada di satuan ketika sidang keliling dilaksanakan, seperti penginputan data perkara pada aplikasi SIPP harus dilakukan di satuan. Dengan kerjasama semua bagian tersebut capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2023 dapat memunuhi target kinerja yang telah di tetapkan.

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tidak menjadi halangan bagi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelesaian perkara dan tugas-tugas administrasi lainnya. Semua beban kerja dapat dibagi habis kepada Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang tersedia.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2023 telah melaksanakan beberapa program kerja yang secara tidak langsung mendukung capaian kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2023 antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022 antara Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan per triwulan.
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
6. Pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Ditjen Badilmiltun MARI tahun 2021.
7. Penyerapan realisasi anggaran pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI kode satker 663247 Tahun 2023.

B. Realisasi Keuangan

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang tepat sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan. Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mendapat alokasi dana dari APBN yang tertuang dalam 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI dan DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023 dan penjabarannya tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL) satuan Kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

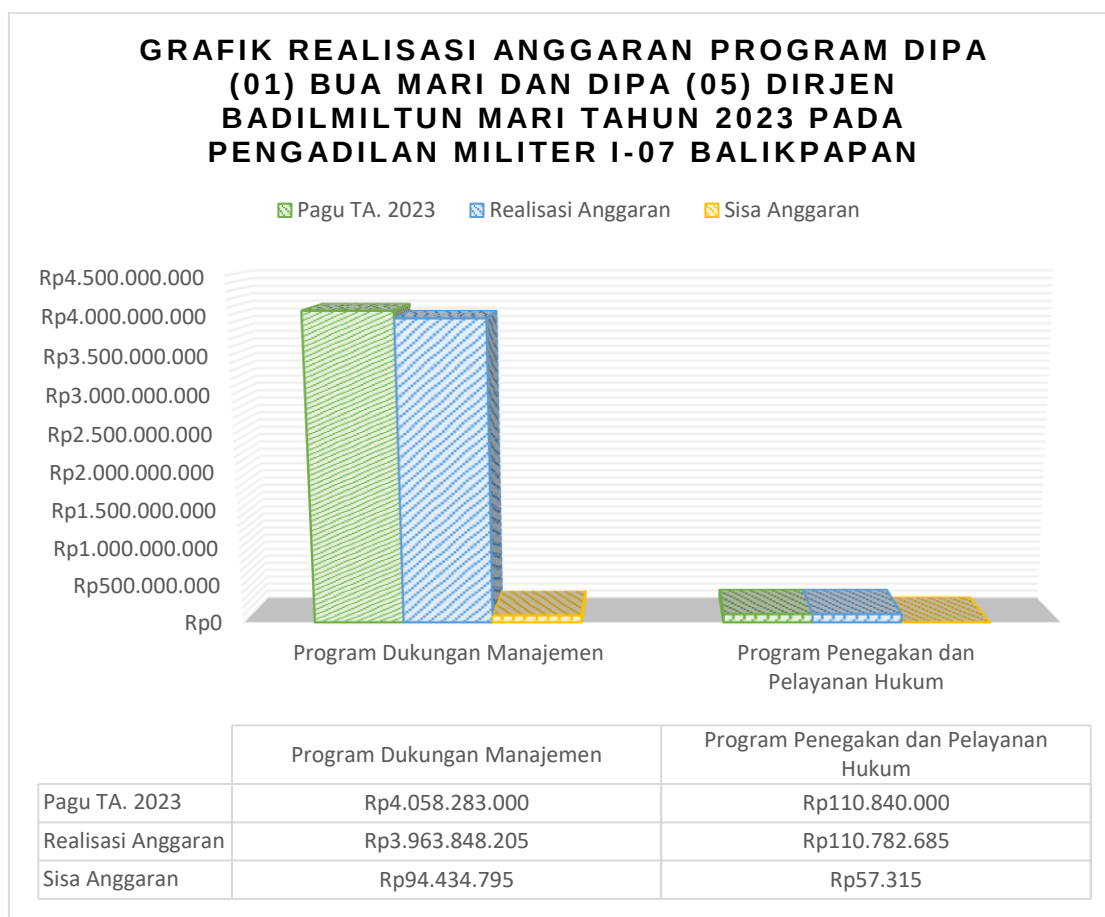
Program kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 2 (dua) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, antara lain sebagai berikut:

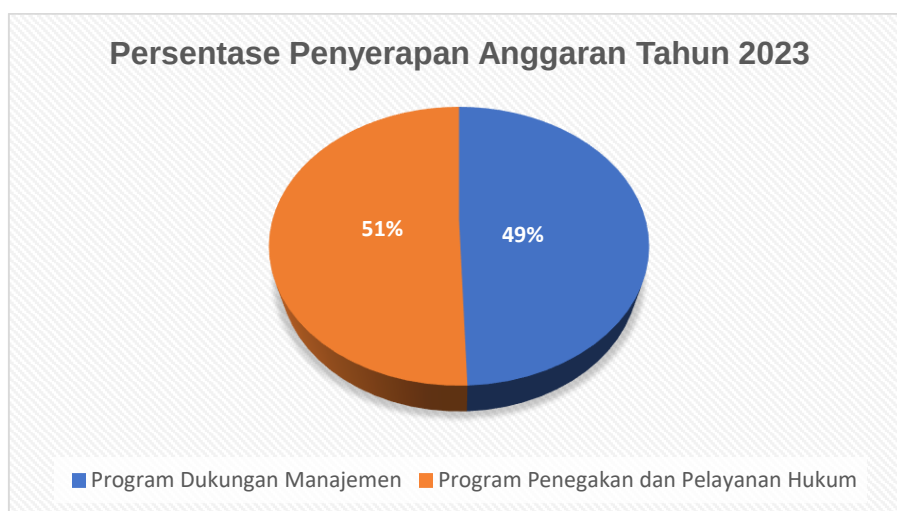
1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam APBN Tahun 2023. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2023 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berdasarkan Revisi DIPA terakhir sebagai berikut:

No	Program Kerja	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen.	4.407.106.000	4.058.283.000	3.963.848.205	97,67	94.434.795
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	110.840.000	110.840.000	110.782.685	99.95	57.315

Sumber Data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023





1. Program Dukungan Manajemen

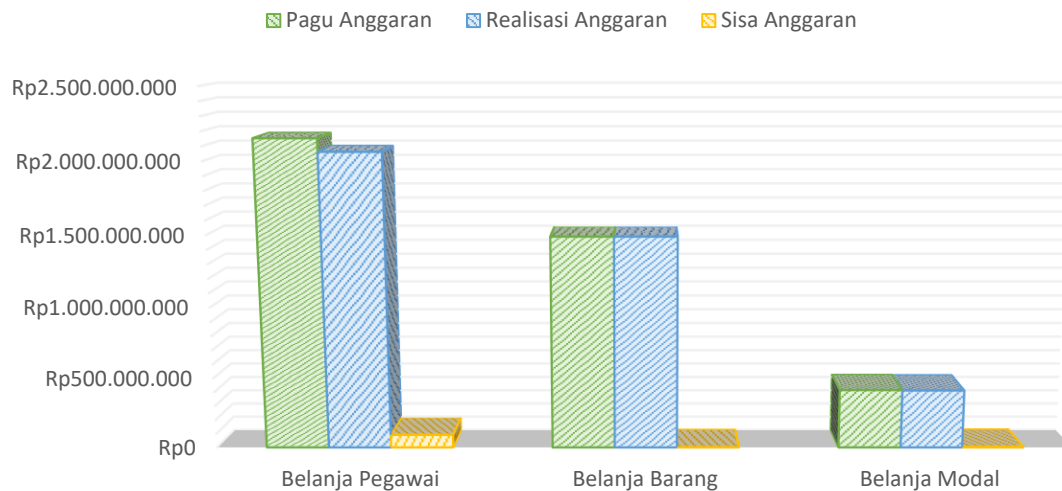
Pada program ini terdapat kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi dan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung, keduanya merupakan kegiatan yang terdapat pada DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 4.058.283.000,- (empat milyar lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Pada tahun 2023 DIPA (01) BUA MARI mengalami 3 (tiga) kali revisi anggaran antara lain revisi dilaksanakan dalam rangka penyesuaian rencana penarikan dana halaman III DIPA, revisi halaman III DIPA dalam hal rencana penarikan dana, revisi pagu minus/surplus terkait belanja pegawai Dilmil I-07 Balikpapan dalam hal revisi Pemutakhiran data hasil Revisi POK.

Kemudian pada bulan Oktober dan Desember dilakukan revisi pagu minus/surplus terkait belanja pegawai Dilmil I-07 Balikpapan. Adapun rincian realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen pada DIPA (01) BUA Mahkamah Agung RI tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.502.632.000	2.153.809.000	2.062.904.130	95.78%	90.904.870
2.	Belanja Barang	1.489.713.000	1.489.713.000	1.489.137.897	99.96%	575.103
3.	Belanja Modal	414.761.000	414.761.000	411.806.178	99.29%	2.954.822
Total		4.407.106.000	4.058.283.000	3.963.848.205	97,67%	94.434.795

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2023

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN PROGRAM
DUKUNGAN MANAJEMEN DIPA (01) BUA MARI
PADA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2023**



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu Anggaran	Rp2.153.809.000	Rp1.489.713.000	Rp414.761.000
Realisasi Anggaran	Rp2.062.904.130	Rp1.489.137.897	Rp411.806.178
Sisa Anggaran	Rp90.904.870	Rp575.103	Rp2.954.822

Realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tahun 2023 ini sangat baik sekali dengan capaian persentase mencapai 97,67% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen), artinya pagu anggaran yang tersedia pada DIPA (01) dapat terserap dengan sangat baik sesuai kebutuhan dan akun belanja yang tersedia pada POK.

Dari tabel dan grafik diatas terlihat bahwa sisa anggaran terbesar terdapat pada belanja gaji dan tunjangan pegawai hal ini dipengaruhi adanya TPM mutasi Hakim pada tahun 2023 presentase penyerapan anggaran mencapai 95.78%, presentase penyerapan anggaran belanja barang mencapai 99.96%, sedangkan pagu belanja modal persentase penyerapan anggaran mencapai 99.29%.

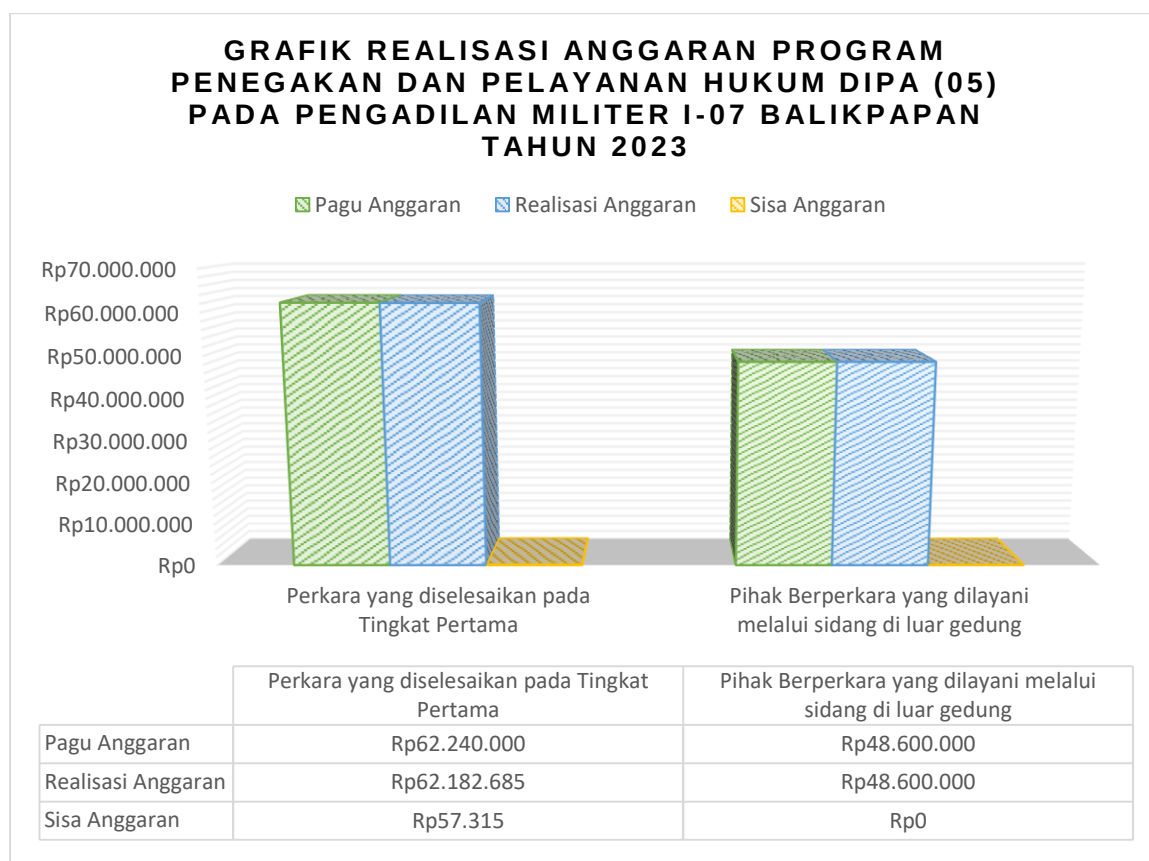
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada program ini terdapat kegiatan peningkatan manajemen peradilan militer yang merupakan salah satu kegiatan yang terdapat pada DIPA (05) Ditjen

Badilmiltun MARI, pada tahun anggaran 2023 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 110.840.000,- (seratus sepuluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) adapun rincian realisasi anggaran pada program tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Dilmil I-07 Balikpapan	Rp. 62.240.000	Rp. 62.182.685	Rp. 57.315	99.91
2.	Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	Rp. 48.600.000	Rp. 48.600.000	0	100

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2023



Pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun anggaran 2023 terdapat 4 (empat) kali revisi anggaran. Revisi dilaksanakan dalam rangka optimalisasi anggaran dan perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA.

Realisasi anggaran pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum terealisasi 99.95% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh lima persen). Pada tahun 2023 penyerapan anggaran sudah mencapai angka yang sangat memuaskan karena pagu anggaran terserap hampir 100% (seratus persen) yaitu sebesar 99.95% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh lima persen). Dalam pengelolaan keuangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memperoleh nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 88,47%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

LKJIP Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2023 ini secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan sangat baik, terdapat berbagai keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah

ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang lebih optimal.

3. Adanya peningkatan kinerja Hakim dan Panitera serta Panitera Pengganti yang di dukung oleh kinerja staf administrasi dalam penyelesaian perkara. Unit kerja telah melakukan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimanfaatkan secara optimal, keadaan jumlah Majelis Hakim disesuaikan dengan rasio penanganan perkara.
4. Disiplin kerja seluruh aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagian merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja unit kerja.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas Pengadilan Militer I-07 Balikpapan senantiasa menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota TNI dan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, seluruh aparatur Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berkomitmen untuk menghindari perilaku yang koruptif serta berupaya memberikan pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel dan berprinsip pada nilai-nilai *good governance* serta dapat menjadi pemicu untuk meraih predikat WBK kedepannya.

B. Saran

1. Untuk menunjang kinerja pada bagian kepaniteraan kiranya ada penambahan personil untuk mengisi jabatan yang masih kosong yakni jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana serta dibagian kesekretariatan jabatan Kasubbag Umum dan Keuangan yang masih kosong sementara diisi oleh PNS Golongan III sebagai Plt. Kasubang Umum dan Keuangan. Selain itu perlu pula penambahan personil Bintara dan Tamtama TNI sebagai Provos, serta penambahan personil ASN terutama yang memiliki kemampuan dan pendidikan di bidang teknologi informasi atau teknik komputer. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang IT tersebut sangat diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan Pengadilan.

2. Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan baik bagi Hakim, pejabat Kepaniteraan dan Panitera Pengganti untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat teknis secara berkesinambungan, dan untuk pejabat Kesekretariatan yang telah menduduki jabatan tetapi belum mengikuti diklatpim IV untuk diusulkan dan dipanggil mengikuti diklat PKP dan PKA, serta untuk pejabat dan staf potensial lainnya juga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan, bimtek dan diklat kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Mahkamah Agung RI atau Badan Diklat pada Kementerian/ Lembaga lainnya.

3. Perlunya peningkatan anggaran pada DIPA (01) BUA MARI, terutama untuk pengadaan meubeleir, lemari arsip, peralatan pengolah data dan komunikasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok yang masih kurang memadai. Untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun untuk kiranya dapat penambahan pagu anggaran terutama pada akun belanja pelaksanaan sidang keliling. Penambahan pagu belanja sidang keliling perlu dipertimbangkan karena luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang meliputi Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

4. Mengusulkan tersedianya nomenklatur untuk menyediakan pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang sedang menjalani hukuman di rumah tahanan militer pada DIPA (05) Ditjen Badilmiltun MARI.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.



Balikpapan, 31 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN:

1. Struktur Organisasi
2. Peta Wilayah Hukum
3. Reviu Indikator Kinerja Utama
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2024
6. Matriks Rencana Strategis 2022-2024
7. SK Tim Penyusunan Laporan LKjlp Tahun 2023
8. Kerangka Pendanaan
9. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2023
10. Laporan Realisasi DIPA (01) BUA MARI Tahun 2022 dan Laporan DIPA (5) Dirjen Badilmiltun Tahun 2023

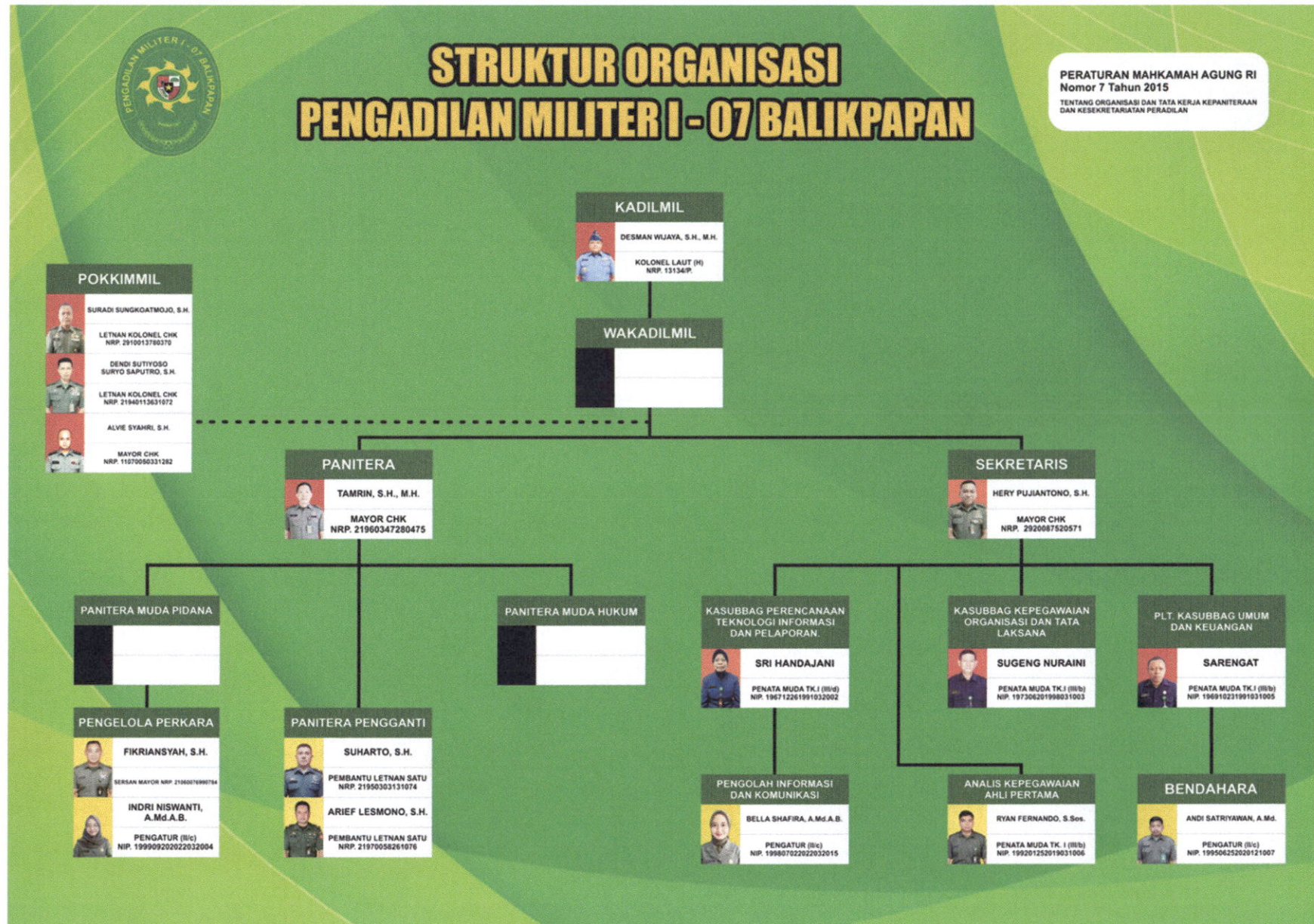


LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI



1. Struktur Organisasi





LAMPIRAN 2

PETA WILAYAH HUKUM



2. Peta Wilayah Hukum





LAMPIRAN 3

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



3. Reviu Indikator Kinerja Utama



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN Nomor: 9./KPM.W1-MIL.07/SK.RA.1.3/II/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

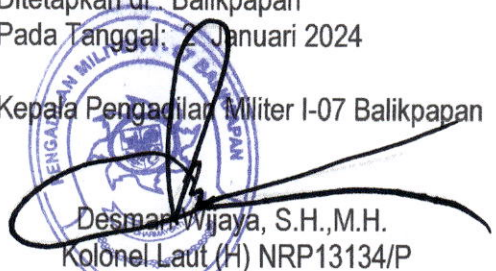
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13134/P

LAMPIRAN I KEPUTUSAN

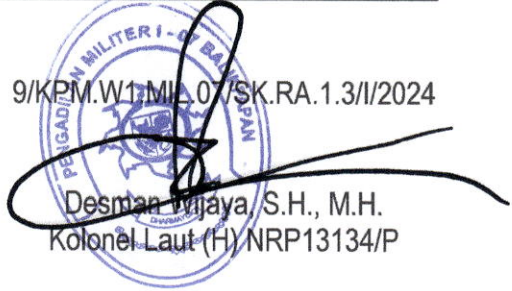
Nomor : 9/KPM.W1.MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Laut (H) Desman Wijaya, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Letkol Chk Suradi Sungkowatmojo, S.H..
3	Pengarah	Mayor Chk Tamrin, S.H.
4	Koordinator	Hery Pujiatono, S.H.
5	Sekretaris	Sri Handajani
6	Anggota	1. Bella Shafira, A.Md. 2. Indri Niswanti, A.Md. 3. Andi Satriawan, A.Md. 3. Rendy Pratama Putra, S Kom. 4. Muhammad Subky, S.H.
7	Sekretariat	Sugeng Nuraini

9/KPM.W1.MIL.07/SK.RA.1.3/I/2024

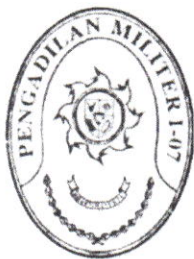

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP13134/P

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I - 07 BALIKPAPAN**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara pidana/Kejahatan dan Pelanggaran lalu lintas.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Stakeholder Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 - Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odml, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. - Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. - Papera; Perwira Penyerah Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			• Odmil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer • Ankum : Atasan yang berhak menghukum.		
6.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Teroinggirkan	Persentase Perakra yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perakra yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perakra yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggian Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

Balikpapan, 3 Januari 2024

Nomor : 03/SEK.W1.MIL.07/UND.RA.1.3/I/2024
Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Tim Penyusun IKU
Pengadilan Militer I-07
Balikpapan
di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Mengharapkan kehadiran Saudara/i dalam Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024

Jam : 09.00 WITA

Tempat : Ruang *Command Center* Pengadilan Militer I-07
Balikpapan

2. Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Waka

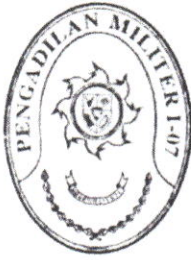
Ub

Sekretaris



Hery Pujiyanto, S.H.

Mayor Ckk NRP 2920087520571



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

NOTULEN KEGIATAN

Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tempat : Ruang Command Center
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Pimpinan Rapat : Kadilmil I-07 Balikpapan
Peserta : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut digunakan sebagai acuan Satuan untuk mereviu Rencana Strategis, menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

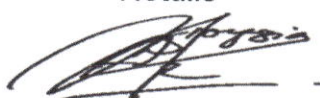
Lebih Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dalam mencapai hasil maksimal dari penilaian tim penyusunan reviu. Dalam pembahasan dan penyusunan reviu Indikator Kinerja Utama oleh tim penyusun Indikator Kinerja Utama harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Setiap anggota dalam tim penyusun Indikator Kinerja Utama harus melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab, serta komunikasi dan koordinasi harus berjalan agar Reviu Indikator Kinerja Utama dapat ditetapkan dan Penyusunan Dokumen dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Notulis


Aloysia Maria Wahyu W. S.Kom
PPNPN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

ABSENSI KEGIATAN

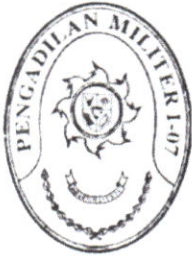
Hari/Tanggal : Jumat, 5 Januari 2024
Perihal : Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	NAMA/ NRP / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	Desman Wijaya, S.H.,M.H Kolonel Laut (H) NRP 13134/P	Pembina		
2.	Suradi Sungkowatmojo, S.H Letkol Chk NRP 2910013780370	Penanggung Jawab		
3.	Tamrin, S.H Mayor Chk NRP 21960347280475	Pengarah		
4.	Hery Pujiyanto, S.H Mayor Chk NRP 2920087520571	Koordinator		
5.	Sri Handajani Penata TK I (IIIId) NRP 196712261991032002	Sekretaris		
6.	Bella Shafira, A.Md.A.B. Pengatur (IIc) 199807022022032015	Anggota		
7.	Rendy Pratama Putra, S.Kom	Anggota		
8.	Aloysia Maria Wahyu Widianingsih, S.Kom	Anggota		
9.	Muhammad Subky, S.H.	Anggota		
10.	Sugeng Nuraini Penata Muda TK I (IIIb) NRP 197306201998031003	Sekretaris		

a.n Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
Waka
Ub

Sekretaris

Hery Pujiyanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920087520571



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

DOKUMENTASI



LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025



4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT) TAHUN 2025**



**PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
FAX/TELP (0542) 8520024
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.**

**RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi, evaluasi dan dokumentasi serta informasi dan statistik serta pemantauan pelaporan	97 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98 %

Balikpapan, 2 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


 Desman Wijaya, S.H., M.H.
 Kolonel Laut (H) NRP13134/P

LAMPIRAN 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024



5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2024

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
(PKT) TAHUN 2024**



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
FAX/TELP (0542) 8520024
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desman Wijaya, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 3 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP. 13134/P

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Militer yang Diselesaikan Tepat Waktu	95 %
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Militer yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	90 %
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan	97 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98 %
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98 %

Kegiatan

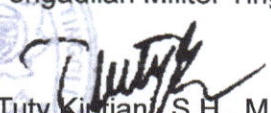
Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Rp. 3.735.536.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Rp. 107.834.000,-

Balikpapan, 3 Januari 2024

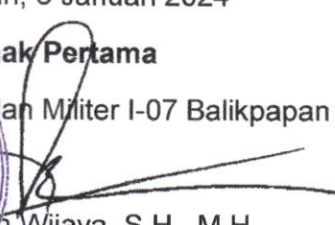
Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer Tinggi - I Medan


Tutty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan


Desnan Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP. 13134/P

LAMPIRAN 6

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2022 - 2024



6. Metrik Rencana Strategis 2022-2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

INSTANSI : Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung

MISI : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
2. Meningkatkan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan, Profesionalisme Tenaga Teknis dan Non Teknis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95	95	95	95	95
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90	90	90	75	75
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	85		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	90	90	90	85	85
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	95	95	95
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100	100	100	90	90

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	97	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	100	100	100	97	97
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana	100	100	100	98	98
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	98		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan	100	100	100	98	98

LAMPIRAN 7

SK TIM PENYUSUNAN LAPORAN LKJIP TAHUN 2023





LAMPIRAN 8

KERANGKA PENDANAAN



8. Kerangka Pendanaan

Matrik Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Pendanaan				
			Prakiraan Maju					Prakiraan maju				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	-	-	-	-	-	-	-	65.420.000	98.809.000	103.600.000	110.840.000	107.834.000
1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	1058 BCA Perkara Hukum Perseorangan	001. Pihak berpekara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung di Pengadilan Militer	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	10 PKR	48.600.000	48.600.000	48.600.000	48.600.000	53.850.000
		U03 Perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I-01 s.d III-19	81 PKR	81 PKR	93 PKR	136 PRK	105 PKR	168.20.000	48.209.000	55.000.000	62.240.000	53.984,000
Program Dukungan Manajemen	-	-	-	-	-	-	-	3.626.518.000	3.498.465.000	4.151.315.000	4.407.106.000	3.735.536.000
		001. Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	2.457.524.000	2.042.632.000	2.502.632.000	2.502.632.000	2.260.069.000
		002. Operasional dan Pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1.343.994.000	1.409.733.000	1.633.683.000	1.485.079.000	1.475.467.000

LAMPIRAN 9

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023



9. Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPI TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	95%	91,14%	95,94%	Pendaftaran Berkas Perkara tepat waktu
						Penetapan Hari Sidang tepat waktu
						Penyelesaian persidangan perkara tepat waktu.
						Penyelesaian perkara minutasi/Upaya Hukum tepat waktu
		Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding.	75%	100%	133%	Penyelesaian perkara tepat waktu
						Minutasi/Upaya Hukum tepat waktu
						Meningkatkan kompetensi Hakim dalam membuat putusan melalui Bimtek
		Presentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85%	80%	94,12%	Penyelesaian perkara tepat waktu
						Minutasi/Upaya Hukum tepat waktu
						Meningkatkan kompetensi Hakim dalam membuat putusan melalui Bimtek
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	95%	98,77%	104%	Mengumpulkan data responden pada aplikasi Survey.
						Membuat laporan secara berkala
						Meningkatkan kualitas putusan yang berkeadilan
						Meningkatkan fasilitas bagi pencari keadilan
						Meningkatkan akses pelayanan publik melalui SIPP dan tersedia meja informasi dan Direktori Putusan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	Pendaftaran Berkas Perkara tepat waktu
						Penetapan Hari Sidang tepat waktu
						Penyelesaian persidangan perkara tepat waktu.
						Pengiriman petikan putusan/Salinan putusan kepada para pihak tepat waktu
						Penyelesaian perkara minutasi/Upaya Hukum tepat waktu.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	90%	100%	111%	Pendaftaran berkas perkara tepat waktu
						Penetapan hari sidang tepat waktu
						Pesidangan di luar gedung pengadilan sesuai resid tepat waktu
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	97%	99%	102%	Melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran lengkap dan tepat waktu
						Menyusun Program Kerja
						Menyusun Dokumen SAKIP dan LKE AKIP
						Melaksanakan Implementasi teknologi Informasi
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.	98%	98%	100%	Melaksanakan administrasi kepegawaian
						Melaksanakan pengelolaan data pegawaian
						Meningkatkan kualitas mutu dan kompetensi SDM non takenis
						Meningkatkan kultas pegawai melalui promosi, rotasi dan mutasu kepegawaian
						Melaksanakan ketentuan disiplin hakim dan Pegawai serta pemberian reward dan punishment

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/STRATEGI/KENDALA/SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
		Presentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan Masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	98%	98%	100%	Melaksanakan tata persuratan, kearsipan dan penggandaan
						Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan hubungan masyarakat
						Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor
						Menyusun Rencana Penggunaan Anggaran
						Melaksanakan panatausahaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05
						Melaksanakan Realisasi dan pertanggungjawaban anggaran DIPA 01 dan DIPA 05
						Melaksanakan pelaporan keuangan

LAMPIRAN 10

LAPORAN REALIASASI DIPA (01) BUA
MARI TAHUN 2022 DAN DIPA (5) DIRJEN
BADILMILTUN TAHUN 2023



10. Laporan Realisasi DIPA (01) BUA MARI dan Laporan DIPA (5) Dirjen Badilmiltun Tahun 2023

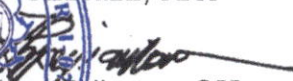


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggian Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

REALISASI ANGGARAN PROGRAM DIPA (01) BUA MARI DAN
DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MARI TAHUN 2023

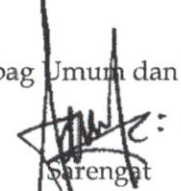
No	Program Kerja	Pagu DIPA semula (Rp)	Pagu DIPA setelah revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	4.407.106.000	4.058.283.000	3.963.848.205	97,67	94.434.795
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	110.840.000	110.840.000	110.782.685	99.95	57.315



Mengetahui,
Sekretaris/KPA

Hery Pujiyanto, S.H
Mayor Mhk NRP 2920087520571

Balikpapan, 29 Desember 2023

Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan


Sarengat
NIP 196910231991031005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggan Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2023
DIPA (01) BUA MARI

No	Kegiatan	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.502.632.000	2.153.809.000	2.062.904.130	95.78%	90.904.870
2.	Belanja Barang	1.489.713.000	1.489.713.000	1.489.137.897	99.96%	575.103
3.	Belanja Modal	414.761.000	414.761.000	411.806.178	99.29%	2.954.822
Total		4.407.106.000	4.058.283.000	3.963.848.205	97,67%	94.434.795

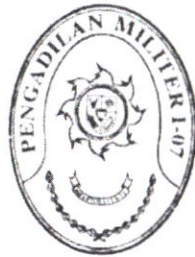


Mengetahui,
Sekretaris/KPA
Reny Pujiyanto, S.H
Makor Chs NRP 2920087520571

Balikpapan, 29 Desember 2023

Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan

Sarengat
NIP 19691031991031005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**
Jl. Syarifuddin Yoes No. 39 Rt.11 Rw.00, Sepinggian Raya,
Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id, balikpapan.dilmil07@gmail.com.

**PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2023
DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MARI**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Perkara pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di wilayah Dilmil I-07 Balikpapan	62.240.000	62.182.685	57.315	99.91
2.	Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	48.600.000	48.600.000	0	100

Balikpapan, 29 Desember 2023



Mengetahui,
Sekretaris/KPA

Hery Pujiyanto, S.H
Mayor Chk NRP 2920087520571

Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan

NIP 196910231991031005



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan untuk tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Balikpapan, 26 Januari 2024

Tim Reviu

Sarangat

NIP 19691023199103100



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN**

JL. SYARIFUDDIN YONES NO. 39 RT.11 RW.00, SEPINGGAN RAYA,
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR 76115,
www.dilmil-balikpapan.go.id. balikpapan.dilmil07@gmail.com.

FORMULIR CHECKLIST REVIU LKjIP

No	Pernyataan		Checklist
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah. 2. LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKjIP telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √ √ √
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian dan data informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP. 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya. 6. Analisa/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya.	√ √ √ √ √ √ √
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan /sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan rencana strategis.	√ √

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan Tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√

